

**MEMBACA ULANG POLITIK
DAN KEBIJAKAN AGRARIA**
(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013)

MEMBACA ULANG POLITIK DAN KEBIJAKAN AGRARIA

(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013)

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Cetakan Pertama, 2013

Penulis : Tim Peneliti STPN
Penyunting : Ahmad Nashih Luthfi
Desain Sampul : Dani RGB
Tata Letak : Eko Taufik

ISBN: 978-602-7894-09-9

Penerbit:

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Gedung Pengajaran Lantai II,
Jalan Tata Bumi nomor 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp : 0274-587239,
e-mail : pppm_stpn@yahoo.com
website : <http://pppm.stpn.ac.id>

Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangan: Perjuangan Perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara

Anna Mariana, Devy DC, Vegitya R. Putri

Abstrak

Perubahan sistem politik pasca-reformasi di beberapa tempat tidak mengubah struktur politik secara substantif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kelompok elite-elite lokal yang menguasai panggung kekuasaan adalah mereka para elite politik lama. Desentralisasi mengubah pula relasi penguasaan sumber daya alam dari penguasaan ijin konsesi ditingkat pusat berpindah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Akibatnya, ijin konsesi pun meningkat pesat pasca otonomi daerah, karena bupati mengobrol ijin konsesi. Kondisi ini akan bertambah massif dengan masuknya skema Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mempercepat proses perampasan tanah (Land Grabbing). Moda perampasan tanah baik skala besar maupun kecil tidak hanya mengambil lahan-lahan wilayah konservasi, namun juga lahan garapan masyarakat. Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur menjadi wilayah frontier bagi para aktor pemangku kepentingan, mulai dari penguasa hingga pengusaha (lokal nasional, hingga internasional). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antara kepentingan elite lokal dalam konstelasi politik lokal dengan dikeluarkannya ijin-ijin konsesi pertambangan yang kemudian proses-proses tersebut mempercepat ketersingkiran penguasaan dan akses perempuan atas tanah.

Katakunci: *Politik lokal; politik konsesi pertambangan; akses perempuan atas tanah*

A. Latar Belakang

Studi agraria menjadi kajian yang menggeliat kembali, baik di kalangan *scholar*, peneliti, maupun di level pemangku kebijakan pada awal abad XXI, setelah masa-masa “keterbungkamannya” pada masa Orde Baru. “Keterbungkaman” studi agraria selama masa Orde Baru dikarenakan adanya upaya pengkerdilan atas isu agraria, dengan “distigmakannya” sebagai bagian dari ajaran “komunis” sehingga dilarang pada masa tersebut. Padahal sejatinya isu agraria merupakan agenda bangsa. Namun, agenda *land reform* membeku seiring dengan “dihilangkannya” para tokoh yang mengusung ini. Bahkan, lebih jauh lagi, pisau analisis sosial yang mampu melihat ketimpangan tersebut pun turut pula “diberangus” pada masa Orde Baru. Akibatnya pada masa Orde Baru sangat jarang muncul sikap kritis terhadap pemerintah dari kalangan akademisi.¹

Rezim pun berganti. Namun, persoalan yang menyangkut agraria justru mulai muncul dimana-mana. Konflik-konflik agraria terjadi lebih masif di berbagai belahan daerah di wilayah negara Indonesia, seolah tidak ada hentinya. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa rezim Orde Baru, yang “memberangus” agenda *land reform* tersebut, telah mewariskan satu persoalan masa lalu akibat dari ketimpangan penguasaan sumber daya alam. Tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa persoalan atas sumber daya agraria yang menimbulkan konflik saat ini pada dasarnya merupakan ujung dari akar persoalan di masa lalu.

Dinamika politik yang masa Orde Baru bercorak sentralistik dan otoriter berubah menjadi sistem desentralistik setelah keluarnya UU Otonomi Daerah pada tahun 1999. Kebijakan ini diikuti dengan UU tentang pemilihan langsung kepala daerah pada tahun 2004. Namun, momentum perubahan rezim sentralistik pasca reformasi ternyata tidak dibarengi dengan perubahan struktur birokrasi. Hal ini menyebabkan perubahan yang diharapkan dari perubahan politik dalam beragam ranah masih belum terwujud. Banyak kasus di beberapa daerah wujud desentralisasi adalah munculnya elite-elite lokal (baru) yang menaikkan tensi politik daerah.²

1 Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 238-240.

2 Beberapa wilayah seperti Papua, Sulawesi dan juga Kalimantan, yang mengalami pemekaran daerah dengan maksud desentralisasi, justru memicu konflik-konflik baru di daerah tersebut.

Salah satu kekisruhan di level politik lokal disebabkan oleh kewenangan daerah dalam mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam melalui ijin-ijin eksploitasi sumber daya alam seperti konsesi perkebunan dan pertambangan. Tidak jarang para calon kepala daerah yang maju dalam pemilukada didukung oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ijin pengelolaan sumber daya alam tersebut. Fenomena ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya adalah sumber daya alam menjadi ajang bagi-bagi “kue” beragam pihak di tingkatan lokal. Bahkan, kasus korupsi suap untuk para pejabat dari para pengusaha agar ijin usaha mereka dikabulkan banyak bermunculan di media massa.³

Pengelolaan sumber daya alam yang diberikan sepenuhnya terhadap pemerintah daerah telah membuat penataan perijinan serta peraturan menjadi begitu tumpang tindih. Persoalan ijin-ijin usaha yang dikeluarkan oleh pemda, utamanya ijin usaha pertambangan (IUP), telah menjadi ajang “mendulang” pendapatan bagi para pejabat daerah untuk ongkos politik yang tinggi. Dalam beberapa kasus terbukti bahwa aktor-aktor lokal—baik mereka yang memang duduk di jajaran pembuat kebijakan publik maupun mereka nonbirokrat namun memiliki legitimasi sosio-kultural yang kuat—memiliki peran substansial dalam valuasi dan validasi terkait IUP.

Secara teoritis, eksistensi para elit di level lokal ini dikenal dengan *local bossism*.⁴ Tak dapat dipungkiri bahwa kelompok elit ini juga ada pada masyarakat adat, meskipun dengan sumber daya politik yang relatif berbeda. Meski ada upaya emansipatoris terhadap masyarakat adat, namun

Lihat Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: YOI dan KITLV, 2007.

3 Salah satu kasus suap yang muncul dilakukan oleh Hartati Murdaya, seorang pengusaha (PT. Hardaya Inti Utama) dan juga salah seorang dewan penasehat dari partai penguasa yakni Demokrat. Ia dituduh menyuap Bupati Buol, Sulawesi, Amran Batalipu, agar dapat memperoleh ijin perkebunan sawit di daerah tersebut.

4 *Bossism* adalah konsep yang menerangkan tentang hubungan *patron-klien*, atau lebih tepatnya memetakan relasi antara negara yang lemah (*weak state*) yang berhadapan dengan oligarkhi yang kuat (*strong oligarchy*). Konsep ini diperkenalkan oleh John Sidel. Unit analisis Sidel adalah politik lokal di Filipina. Melalui investigasi di dua provinsi, yaitu Cavite dan Cebu, Sidel menunjukkan fenomena *bossism* dimana eksistensi negara yang sangat lemah dihadapkan pada dominasi oligarkhi berbasis tanah. Struktur masyarakat Filipina tersebut, oleh Sidel, disebut sebagai *bossism*. Lihat Sidel, J. T. (1997). “Philippine Politics in Town, District, and Province: Bossism in Cavite and Cebu.” *The Journal of Asian Studies* 56(4): 947-966.

banyak ditemukan bahwa mereka yang duduk sebagai elit dalam suatu masyarakat adat tertentu juga berposisi sebagai elit politik lokal.

Tak jarang dijumpai bahwa beberapa pimpinan masyarakat adat bahkan juga menduduki sebagai kepala daerah. Maka hal ini berpotensi membuka peluang bagi lahirnya *local bossism* yang baru ataupun melestarikan sistem elit lokal yang memang sudah ada. Tidak mustahil bahwa seorang aktor memiliki berbagai peran dalam masyarakat sehingga kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya terakumulasi pada aktor tertentu saja. Peran-peran yang terakumulasi pada suatu kelompok aktor inilah yang dapat dijadikan sebagai asumsi awal atau setidaknya sebagai indikasi bahwa IUP dapat diberikan dengan sedemikian longgar karena antara pemberi IUP dan pemegang IUP adalah aktor yang sama atau setidaknya berada dalam lingkaran elit yang sama.

Adapun wilayah yang paling banyak mengeluarkan IUP adalah di Kalimantan. Pulau ini memiliki jumlah perijinan pertambangan terbanyak, sedikitnya 2.506 ijin atau 30 persen lebih dari total ijin pertambangan di Indonesia. Jumlah ini tentunya akan meningkat, mengingat pemerintah kemudian menetapkan Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang lumbung energi nasional dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (*MP3EI*). Dalam skema ini, kegiatan ekonomi utamanya yaitu energi (migas dan batubara) dan mineral (bauxit dan besi baja).

Dari jumlah ijin pertambangan di Pulau Kalimantan, separuh lebih berada di Kalimantan Timur (Kaltim). Tercatat Kaltim telah mengeluarkan Kuasa Pertambangan/ Ijin Usaha Pertambangan (KP/IUP) mineral dan batu bara sampai akhir 2012 berjumlah lebih dari 10.000 izin, 4.300-an diantaranya merupakan IUP batubara. Jika diperhatikan, investasi di bidang pertambangan setelah otonomi daerah sampai terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2009 berjumlah lebih dari 9.500 perusahaan.⁵ Data JATAM menyebutkan pada 2007 jumlah ijin pertambangan di sebuah kabupaten Bulungan misalnya terdapat 18 perusahaan dengan luas lahan konsesi mencapai 59.516 Ha. Pada tahun 2009 bertambahnya 15 KP menjadi 33 KP. Tapi pada Desember 2012 izin kembali bertambah

5 "Izin Tambang Meledak Setelah Otonomi". *Kaltimpost*, 14 Maret 2013. Diakses dari: <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/14681/izin-tambang-meledak-setelah-otonomi.html> pada 15 Juni 2013 pukul 12.30 WIB.

dari 119 tambang menjadi 152 ijin dengan luasan lahan 664.278 Ha.⁶ Persoalan pemberian izin pun mencakup pemberian izin yang tumpang tindih.

Akibat kondisi semacam itu, masyarakat Kalimantan Timur mengalami kondisi budaya yang terus-menerus dalam situasi wilayah *frontier*⁷ dengan komoditas “favorit”-nya adalah batubara. Konsesi pertambangan ini memerlukan lahan untuk menjadi areal pertambangannya. Tidak hanya hutan alami maupun hutan lindung yang menyusut, bahkan tanah-tanah yang menjadi lahan produksi pangan warga pun mulai dilirik dan “direbut”. Lahan-lahan warga yang berubah tersebut akhirnya mengubah fungsi lahan pangan warga Kalimantan Timur.

Satu aspek penting dalam perubahan fungsi lahan tersebut yang kadangkala luput dari amatan adalah soal ketersingkiran akses perempuan atas sumber daya alam/tanah. Di dalam masyarakat yang berbasis pada pengolahan lahan/tanah seperti sawah, perempuan memiliki peranan yang intensif. Para perempuan dalam masyarakat tani merupakan perempuan yang mandiri secara ekonomi maupun kultural. Namun, dengan perubahan kondisi *tenurial* akibat pertambangan, posisi perempuan menjadi semakin termiskinkan.

Soal kondisi lingkungan yang berubah patut menjadi sorotan yang jarang dilihat sebagai persoalan yang dihadapi jika suatu wilayah menjadi daerah pertambangan. Kualitas udara yang buruk, terganggunya kesehatan ibu dan anak adalah satu pokok dari beragam persoalan yang dihadapi langsung oleh perempuan sebagai golongan yang paling rentan.⁸ Beban ganda harus dihadapi oleh perempuan yang hidup di wilayah pertambangan mengingat mereka sekaligus berperan sebagai pelaku ekonomi.

Studi ini mengambil dua wilayah di Kutai Kertanegara sebagai titik fokus dengan pendekatan perbandingan. Wilayah pertama adalah Desa

6 Firman Hidayat. <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/28/058483967/Izin-Tambang-di-Kalimantan-Timur-Terus-Bertambah> pada 15 Juni 2013 pukul 12.45 WIB.

7 Pembahasan mengenai *Frontier* akan dijelaskan pada bagian kedua pada tulisan ini.

8 Laila Mustikaningrum, “Pemiskinan Perempuan dalam Industri Pertambangan Batubara (Studi Kasus Kota Samarinda-Kaltim)”, makalah dipresentasikan dalam Konferensi pengetahuan II dengan tema *Perempuan dan Pemiskinan* yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1–4 Desember 2012.

Kertabhuana yang terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang. Penduduk desa ini berasal dari Bali dan Lombok yang melakukan transmigrasi pada tahun 1980-an. Perusahaan tambang batu bara yaitu PT Kitadin beroperasi berbarengan dengan masuknya para penduduk ke desa ini, namun ijin pertambangan dan banyaknya perusahaan yang masuk ke desa ini pada masa setelah otonomi daerah. Desa kedua adalah Desa Lung Anai yang merupakan desa kampung Dayak Kenyah Lepoq Jalan yang cenderung lebih homogen. Kondisi desa Lung Anai saat ini terancam pula oleh pertambangan.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat permasalahan utama yang muncul yakni soal bagaimana politik lokal yang berkaitan erat dengan dikeluarkannya ijin konsesi pertambangan memberi dampak perubahan terhadap penguasaan warga (perempuan) terhadap tanahnya. Persoalan ini akan diterjemahkan melalui beberapa pertanyaan kunci berikut:

1. Bagaimana hubungan desentralisasi birokrasi dengan perijinan tambang?
2. Siapa sajakah para aktor yang terlibat dalam kontestasi pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kutai Kertanegara?
3. Bagaimana proses tersingkirnya perempuan terhadap tanahnya yang diakibatkan oleh konsesi pertambangan di Desa Kertabhuana dan Desa Lung Anai?

Studi Terdahulu

Akumulasi kapital melalui penguasaan sumber agraria yang menjadi penghambat dalam pelebagaan demokrasi lokal dalam menjelaskan kondisi politik lokal Kutai Kertanegara telah dijelaskan oleh studi Amin Tohari.⁹ Tulisan ini menemukan bahwa penguasaan yang timpang terhadap sumber-sumber agraria pada tingkat lokal di Kutai Kartanegara menjadikan kualitas dan substansi demokrasi jauh dari harapan.

9 Amin Tohari, "Akumulasi Penguasaan Sumber Agraria Sebagai Penghambat Pelebagaan Demokrasi Lokal (Mendiskusikan Kutai Kertanegara)", *Jurnal Politika*, Vol.8, No.1, tahun 2012, hal. 43-64.

Demokrasi justru menjadi ajang bekerjanya akumulasi kapital kelas elite untuk menjaga dan memperluas penguasaan sumber agraria tambang dengan jalan menduduki posisi-posisi strategis di dalam birokrasi lokal yang lemah melalui legitimasi aturan dan prosedur demokrasi lokal.

Demokrasi lokal di dalam konteks ketimpangan penguasaan sumber agraria tersebut bukan merupakan arena rakyat melainkan adalah arena pertarungan para bos dan anak-anaknya. Penelitian Amin tersebut menjelaskan konteks dinamika politik lokal dan tidak masuk pada dampak dari politik lokal terhadap kehidupan warga masyarakat terutama kalangan perempuan. Sedangkan riset kami memperlihatkan bagaimana para perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang terpinggirkan dalam industri ekstraktif tersebut terus bersiasat dan berjuang atas hak tanah mereka.

Menurut Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, dua hal yang menonjol dari dinamika politik lokal di Indonesia pasca Orde Baru adalah: pertama, politik lokal di Indonesia selalu berusaha dikendalikan oleh pusat karena sumber-sumber daya alamnya yang menggiurkan; kedua, munculnya *local strongmen* sebagai akibat dari politik sumber daya alam tersebut. Politik lokal di Indonesia merupakan kombinasi persaingan kepentingan antara *local strongmen* (termasuk bos ekonomi) dan pejabat lama (bangsawan dan awam) yang semuanya berupaya untuk terus membangun dan mengekalkan kekuasaannya di daerah. Masing-masing mereka berusaha menjadi pemenang agar sumber-sumber ekonomi di daerah dapat terus dikendalikan kelompok mereka.¹⁰ Kajian tersebut memberi kerangka terhadap penelitian untuk menempatkan konteks kekhasan politik lokal di daerah Kutai Kertanegara, khususnya politik desa di Kerthabuana dan Lung Anai.

Secara lebih khusus penelitian mengenai pertambangan batubara di Kalimantan telah dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur. Dalam laporan penelitian yang berjudul *Deadly Coal*, dapat dilihat tentang pemetaan kondisi pertambangan di Kalimantan secara umum dan bekerjanya alur ekonomi politik dari industri pertambangan ini. Studi ini menjadi rujukan penting untuk memetakan posisi kedudukan Kaltim dalam konteks ekonomi politik industri ekstraktif. Selain itu Jatam juga

10 Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff. "Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik." *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, 2010.

telah melakukan riset soal keterkaitan penambangan batu bara, pangan dan perempuan di Desa Kerthabuana. Dari hasil temuan tim diketahui bahwa penambangan batu bara membawa pengaruh sangat besar terhadap kondisi sawah garapan penduduk Desa Kerthabuana. Orang-orang Bali menjadi transmigran ke Kerthabuana untuk mencari tanah demi kemakmuran hidup mereka, namun kondisi saat ini keberadaan mereka terancam oleh perluasan areal pertambangan perusahaan batu bara. Dalam studi ini diketahui pula bagaimana lemahnya posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan atau musyawarah desa mengenai tambang, baik itu untuk penawaran tanah, pengambilan keputusan, serta tindakan masyarakat terhadap pertambangan. Perempuan Desa Kerthabuana masih jarang dan bahkan tidak pernah diajak ikut bergabung dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut.

Hal yang berbeda dari penelitian Jatam adalah melihat secara komparatif antara desa Kertabhuana sebagai desa transmigran dengan desa yang bukan desa transmigrasi, yakni desa Lung Anai dalam konteks percepatan laju pembukaan lahan pertambangan batu bara serta penguasaan *tenurial* para perempuan di dua desa tersebut di dalam konteks kultural dan sejarah penduduk desa yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk melihat sesuatu yang lebih dalam dalam kehidupan perempuan, yang biasanya tidak terlalu diperhatikan secara lebih oleh suatu riset (*seeing the unseen*).

Metode dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan dan *desk study* yang menggunakan metodologi etnografi-historis dalam berperspektif politik ekologi feminis. Adapun pengertian sederhana politik ekologi feminis adalah suatu perspektif yang mencoba melihat ketidakadilan akses dan kontrol atas sumber daya alam yang berkaitan dengan politik ekologi dengan menambah gender sebagai variabel penting dalam melihat persoalan tersebut bersama dengan variabel yang lain seperti kasta, ras, kultur dan etnisitas, dst.¹¹ Terutama dalam memahami hubungan konteks perubahan lingkungan di tingkat global yang mempengaruhi proses perjuangan laki-laki maupun perempuan dalam satu komunitas atas

11 Mia Siscawati dan Avi Mahaningtyas, "Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan Tata Kelola Hutan di Indonesia", dipresentasikan dalam seminar Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan Tata Kelola Hutan di Indonesia, Kamis, 18 Oktober 2012. Bogor, hal. 3-5.

lingkungan/penguasaan sumber daya alam ditingkat lokal, dalam skema “pembangunan berkelanjutan”.¹²

Dalam studi lapangan secara etnografis-historis seorang peneliti akan memulainya dengan catatan terhadap persoalan masa kini dan menariknya hingga akar permasalahannya. Tidak jarang persoalan tersebut telah berlangsung sangat lama. Maka metodologi historis, melalui sejarah lisan akan membantu penelitian ini. Sejarah lisan dengan perspektif feminis yang digunakan tersaji melalui metode tutur perempuan. Ini menjadi pilihan dalam riset kami. Tutur perempuan penting untuk mengungkap apa yang biasanya tidak nampak, yakni pengalaman perempuan itu sendiri menjadi lebih terang benderang.¹³

Penelitian lapangan menggunakan 3 teknik pengumpulan data yakni: observasi langsung (*direct observation*), dokumentasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan penekanan pada metode tutur perempuan, dan ketiga adalah *desk study* (Studi literatur).

Observasi langsung dilakukan di area penambangan sekitar Desa Kerthabuana dan Desa Lung Anai. Pengumpulan informasi dari para informan kami dapatkan melalui wawancara mendalam dengan mereka. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan informan kunci di kedua desa tersebut selama sepuluh hari. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen RPJMD (Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), daftar sengketa lahan BPN Kaltim serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Sistematika penulisan

Laporan penelitian ini dibagi kedalam tiga bagian. Bagian *pertama* membahas mengenai dinamika politik lokal dan konsensi pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara lebih khusus, bagian ini akan

12 Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, Esther Wangari, “Gender and Environment: A feminist political ecology Perspective”, dalam Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, Esther Wangari (eds), *Feminist Political Ecology*, (New York and London: Routledge, 1996), hlm. 4-5.

13 Metode tutur perempuan adalah cara untuk menggali pengetahuan berdasarkan pada pengalaman perempuan yang biasanya seringkali tidak terlihat. Praktek metode tutur perempuan ini, salah satunya adalah mengungkapkan kejahatan berbasis gender pada peristiwa politik 1965-1966 sebagaimana yang dilakukan oleh komnas perempuan. Lebih lanjut baca Komnas perempuan, *Kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007).

membahas terbentuknya rezim konsensi pertambangan di Kukar dan juga membahas aktor-aktor yang terlibat dalam konstelasi rezim konsesi ini. Bagian ini juga sebagai pengantar mengenai konstelasi politik lokal di Desa Kerthabuana dan Desa Lung Anai.

Bagian kedua membahas mengenai sejarah dua desa penelitian secara khusus. Bagian ketiga membahas mengenai perjuangan para perempuan dalam mempertahankan akses atas tanah mereka. Bagian ini memaparkan narasi pengalaman para perempuan yang ada di Desa Kerthabuana dan Desa Lung Anai ditengah gempuran pertambangan yang dihadapi mereka. Laporan penelitian ini ditutup dengan kesimpulan hasil penelitian dan juga *policy note* untuk BPN.

B. Konstelasi Politik dan Ijin Pertambangan di Kutai Kertanegara

Ketika melintasi kawasan Bukit Suharto, Toto menunjuk areal suaka margasatwa beruang madu dan suaka margasatwa *orang utan*. Kawasan tersebut bernama Bukit Suharto karena dulunya mantan presiden RI tersebut sering datang, bahkan memiliki rumah peristirahatan yang cukup mewah di sana. Dulunya kawasan hutan ini cukup terlindungi sehingga memang memenuhi kualifikasi sebagai suaka margasatwa. Namun setelah batubara ditemukan dan menjadi komoditas favorit, maka kawasan Bukit Suharto yang berada di daerah administratif Kecamatan Samboja ini tidak lagi rimbun. Kawasan hutan semakin sempit, sementara areal pertambangan batubara semakin meluas dengan cepat. Banyak sekali praktek penambangan di hutan lindung, ataupun areal hutan-hutan lainnya. Akibatnya sering terjadi longsor di lereng-lereng bukit, pendangkalan sungai Mahakam, dan banjir di Samarinda. (Catatan lapangan, 12 Juli 2013)

Wajah pulau Kalimantan adalah wajah wilayah *frontier*. Pengertian *frontier* adalah suatu wilayah yang selalu hanya dilihat sebagai penghasil komoditas ekonomi bagi siapapun, baik bagi penguasa apalagi pengusaha. Wilayah *frontier* selalu berada dalam kondisi tereksplorasi sumber daya alam secara terus-menerus.¹⁴ Akibat dari situasi semacam itu, maka kondisi

¹⁴ Pengertian *frontier* dapat ditemui dalam Anna Tsing, *Friction : An Ethnography of Global Connection*, (Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2005), hal 27-30. Lihat pula Kuliah Umum Pujo Semedi "Etnohistori dalam Penelitian Empiris Pedalaman: Kuliah Umum Pujo Semedi Hargo Yuwono" di Auditorium FIB UGM, 27 Juli 2012 dari: <http://>

budaya yang tercipta di wilayah *frontier* tidak dapat dirujuk sebagai kondisi budaya yang “normal” seperti memiliki keamanan yang baik. Di wilayah *frontier* keamanan yang seharusnya dijaga dan dijamin oleh negara tidak dapat didapatkan oleh masyarakat. Dalam kondisi wilayah *frontier*, yang terjadi justru adanya regulasi yang tumpang-tindih, hukum dapat diperjual-belikan, hak atas tanah bisa direbut sewaktu-waktu, sehingga jargon “siapa yang kuat dia yang berkuasa”—semacam hukum rimba—menemukan wajahnya di wilayah ini. Termasuk pula dalam hal ini adalah soal perebutan sumber daya alam.¹⁵ Maka, di wilayah *frontier*, mulai dari akses informasi, akses pendidikan hingga akses kesehatan selalu menjadi barang mewah bagi masyarakat.

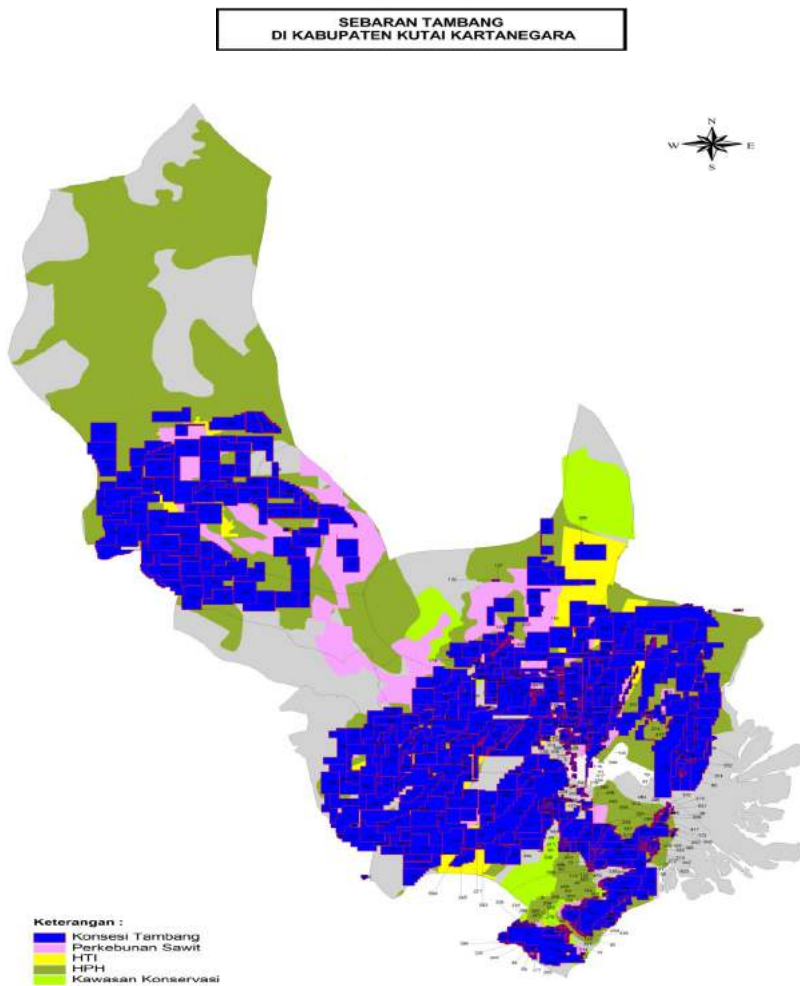
Kalimantan dalam perjalanan historisnya selalu menjadi daerah *frontier*. Hal ini dapat dibuktikan sejak masa kolonial Kalimantan merupakan wilayah terdepan yang mengalami eksploitasi sumberdaya alam. Mulai dari eksploitasi minyak bumi, industri kayu masa Orde Baru hingga saat ini berganti menjadi industri ekstraksi batubara. Kalimantan selalu menjadi tempat “favorit” bagi para pelaku eksploitasi seperti para penguasa dan pengusaha.¹⁶ Sebagaimana catatan lapang yang kami kutip dibagian pembuka bagian ini, wajah Kalimantan Timur jelas sedang berubah menjadi wilayah *frontier* dengan komoditas Batubara.

Memasuki era otonomi daerah terbentuk beberapa kabupaten-kabupaten baru hasil pemekaran. Muncul Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai. Bupati pertama Kutai Kartanegara adalah Syaukani, HR. Dalam menyambut otonomi daerah, Syaukani optimis untuk mengembangkan Kutai Kartanegara. Menurutnya sistem kekuasaan yang sentralistik mengakibatkan pendapatan sumber daya alam banyak tersedot ke pemerintah pusat.¹⁷ Pada era otonomi daerah, mata rantai kebijakan sudah diperpendek, dan yang mengontrol wewenang pemberian ijin adalah bupati. Pemberian

ethnohistori.org/database/audio-visual/ethnohistori-dalam-penelitian-empiris-pedalaman-kuliah-umum-pujo-semadi-hargo-yuwono, diakses tanggal 2 Oktober 2013.

- 15 Rikardo Simarmata, “Legal complexity in natural resources management in the frontier Mahakam Delta of East Kalimantan, Indonesia”, dalam *Jurnal of Legal Pluralism*, No. 62, 2010, hal 118-120.
- 16 Arief Wicaksono dan Siti Maemunah (ed), *Membaranya batubara: Pengerukan Batubara dan generasi suram Kalimantan*, (Jakarta: Jatam, 2010), hal 10-16.
- 17 Syaukani HR. *Menolak Kembalinya Sentralisasi, Memantapkan Otonomi Daerah*. (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004). hlm.128.

kewenangan kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan sumber daya alam pada dasarnya memiliki wajah ganda yaitu menjadi harapan sekaligus ancaman.¹⁸ Harapan bertumpu pada asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi lapangan, peka terhadap masalah lingkungan hidup. Disisi lain, ancaman datang bagi kelestarian lingkungan hidup bila anggapan diatas tidak dilaksanakan dengan penuh komitmen.



Gambar 1. Peta Sebaran Konsesi pertambangan di Kukar
Sumber : JATAM, tahun 2009 (Desember).

18 Gerry Van Klinken, "Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal" dalam Jamie. S Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (ed.), *Adat Dalam Politik Indonesia 2010*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV), hlm.173.

Berpijak dari optimisme Syaukani, pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2010 dengan keinginan untuk mengubah pengelolaan SDA dari eksploitasi SDA yang tidak dapat diperbaharui kepada pengembangan SDA yang dapat diperbaharui, ditingkatkan dan dikembangkan di masa mendatang. Hal ini karena peranan sektor Pertambangan dan Penggalian yang masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni sebesar 76,25 persen sedangkan sektor Pertanian dan sektor lainnya menyumbang sebesar 10,45 persen dan 13,30 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara.¹⁹

Optimisme Syaukani dan orientasi RPJMD mengenai pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui berkebalikan dengan realitas di lapangan. Setelah adanya otonomi daerah dan pemberian izin penambangan diserahkan kepada daerah, praktik penambangan sumber daya alam justru semakin carut marut. Pemberian izin tambang diberikan dengan mudah tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Kondisi politik Kutai Kartanegara menjelang pemilu 2004 dapat dijadikan sebagai contohnya. Pada Pemilu 2004 mulai terbentuk kolaborasi antara negara dan pengusaha untuk mengamankan pemilu di Kutai Kartanegara. Hal ini tampak dalam rapat koordinasi antara pihak Pemerintah kabupaten Kukar dan 12 perusahaan bidang batubara dan migas pada 4 Maret 2004 di gedung KPU Kukar. Pemkab meminta partisipasi aktif perusahaan untuk mendukung pelaksanaan pemilu di kecamatan tempat perusahaan beroperasi. Pemkab juga meminta dukungan berupa sarana transportasi untuk mengangkut pasukan pengamanan, alat peraga, surat dan kotak suara dari TPS, Kecamatan dan KPU.²⁰

Terdapat perbedaan jelas antara penambangan sebelum otonomi daerah dan setelah diterapkannya otonomi daerah di Kabupaten Kutai Kertanegara. Sebagaimana pendapat Haris Retno, dosen hukum lingkungan di Universitas Mulawarman.

Setelah otonomi daerah, pelaku penambangan adalah pemegang kekuasaan. Sedangkan sebelum otonomi daerah, tipe pertambangannya berskala besar dan sahamnya dimiliki asing seperti Kaltim Prima Coal (KPC), Berau Coal,

19 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kertanegara, tahun 2005-2010.

20 Perusahaan di Kukar Dukung Pemilu 2004. <http://www.kutaikartanegara.com/gallery/tgr.html/berita/2004/news050304.html>. diakses pada 23 November 2013 pukul 06.30

Tanitu, Lanna Harita. Sekarang yang kelihatan marak adalah setelah otonomi daerah. Namun jika dilihat skala luas wilayahnya sebenarnya hampir sama. Perusahaan skala besar namanya sedikit, namun luasnya sama besar dengan izin yang dikeluarkan oleh daerah yang jumlahnya ribuan²¹

Pada masa Syaukani HR yang menjabat bupati dari tahun 1999 sampai 2004 belum banyak izin penambangan yang diumbar. Ijin penambangan meningkat drastis menjelang dilaksanakan pilkada langsung pertama di Kutai Kartanegara sekaligus di Indonesia. Syaukani yang mencalonkan kembali menjadi bupati Kutai Kartanegara kedudukannya sebagai bupati sementara digantikan oleh pejabat H. Awang Dharma Bakti (2004-2005). Namun pengangkatan Awang Dharma Bakti ditolak oleh pendukung Syaukani. Beberapa bulan kemudian Mendagri mengangkat pejabat pengganti yang baru yaitu Kolonel (Purn) Hadi Sutanto. Pada masa pejabat sementara inilah ditengarai banyak izin penambangan yang dikeluarkan. Hal ini terus berlanjut pada masa periode kedua kepemimpinan Syaukani HR.

Pada pilkada pertama Kutai Kartanegara, tiga pasangan bertarung, yakni pasangan Aji Sofyan Alex-Muhammad Irkham yang diajukan PKS dan PAN, Tajuddin Noor-Abdul Djabar Burkam (PPP, Partai Patriot Pancasila, dan Partai Merdeka), serta Syaukani HR-Samsuri (Partai Golkar). Hasilnya, Syaukani dan Samsuri keluar sebagai pemenang dengan total suara 60,85 %. Kemenangan ini menunjukkan bahwa partai Golkar masih memiliki kekuatan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Walaupun pilkada berjalan lancar, suara masyarakat yang cenderung *golput* sudah terjadi pada pesta demokrasi ini. Proporsi *golput* terhadap jumlah pemilih terdaftar mencapai 29.3 %. Angka ini mempunyai selisih besar jika dibandingkan dengan pemilihan presiden 2004 yang hanya 8,3 % terjadi lonjakan lebih dari tiga kali lipat.²²

Sekitar dua tahun Syaukani menjabat bupati, ia divonis oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi berupa hukuman penjara dua tahun enam bulan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi selama 2001 hingga 2005 dan merugikan negara Rp.113 miliar. Tindak pidana korupsi

21 Wawancara tim peneliti dengan Haris Retno, 14 Juli 2013 di Tenggarong, Kaltim; jam 19.00-22.00.

22 Iganitius Kristanto. Mantan Kepala Daerah Berkuasa Kembali: Setahun Pilkada Golput Meningkat, dari: http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6433&coid=3&caid=3&gid=2 diakses pada 31 Oktober 2013 pukul 17.45 WIB.

yang dilakukan Syaukani adalah menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat.

Lengsernya Syaukani sebagai bupati Kutai Kartanegara berakibat digantikan oleh wakilnya, yaitu Samsuri Aspar sebagai pelaksana tugas bupati (2007-2008). Namun, Samsuri Aspar pun terjerat kasus korupsi sehingga digantikan oleh Shahrudin (2008-2009) dan Sulaiman Gofur (2009-2010). Pada periode ini, izin penambangan keluar hampir 230 ijin atau bila dirata-ratakan sama saja dengan 2-3 ijin pertambangan/hari. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Jatam Kaltim, Kahar Al Bahri:

Periode kedua Syaukani menjabat, baru sekitar 2 tahun, dia tersangkut kasus. Pada masa akhir 3 tahun tersebut ada 3 kali pergantian PLT. Tetapi semuanya menjadi tersangka seperti Samsuri Aspar. Disinilah terjadi jor—joran ijin tambang dengan rata-rata 3 hari sekali ijin keluar, sampai ada penunjukkan pemilihan bupati lagi.²³

Pada pilkada 2010, terjadi pertarungan sengit antara pasangan calon bupati dan wakil bupati. Diantaranya yaitu Sugiyanto-Fathan Djoenaidi, Rita Widyasari-Ghufron yang diusung koalisi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra; Awang Ferdian Hidayat-Suko Bueno; Awang Dharma Bhakti-Saiful Aduar; Edward Azran-Syahrani; dan M Idrus SY-Agus Shali. Pasangan Rita Widyasari-Ghufron menang mutlak dengan suara 55, 45%. Pada Pilkada ini, angka *golput* mencapai 34,4% dari total daftar pemilih tetap (DPT) 431.738. Presentasi *golput* tertinggi berasal dari Kecamatan Sanga-Sanga yaitu mencapai 46,44 % dan Kecamatan Muara Jawa mencapai 39,29%. Dua kecamatan ini adalah kecamatan yang dikepung oleh perusahaan-perusahaan tambang.

Kemenangan Rita Widyasari merupakan hal yang sangat wajar, karena Rita Widyasari merupakan anak dari bupati sebelumnya yaitu Syaukani HR. Hal ini menunjukkan tingkat lingkaran *local bossism* yang kuat terjadi di Kukar. Pada masa kepemimpinan Rita Widyasari, tidak ada izin yang turun karena saat itu sedang diterapkan skema *clear and clean* (moratorium). Namun, menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang

23 Wawancara Tim dengan Kahar Al Bahri (Jatam Kaltim), 12 Juli 2013; jam 13.30-15.00 di Samarinda, Kaltim.

(Jatam) Kaltim, Kahar Al Bahri, walaupun jumlah ijin tidak bertambah, tetapi luas area tambang semakin luas.²⁴

Aktor-Aktor dalam Lingkaran Kuasa Tambang

Aktor yang berperan dalam pertambangan di Kukar tidak hanya penguasa, dalam hal perijinan, namun juga para pengusaha. Para pengusaha dalam lingkaran pertambangan di Kukar beragam asalnya: mulai dari kalangan militer seperti Jend. Luhut Pangaribuan dan Prabowo Subianto; kalangan pengusaha sipil seperti Arifin Panigoro, Tommy Winata, Bob Hasan, dan Sutiyoso²⁵; serta termasuk para selebritis-selebritis nasional seperti Yuni Shara dan Kiki Barki.²⁶

Hubungan antara pengusaha dengan penguasa tidak hanya dengan elite politik daerah. Memiliki hubungan dengan lingkaran pejabat pusat pun, harus dimiliki oleh para pengusaha ini. Lingkaran pertemanan ini sangat berpengaruh dalam menentukan “siapa” berbisnis “apa”. Artinya, diluar lingkaran tersebut, atau tanpa koneksi terhadap lingkaran tersebut, akan mustahil berbisnis skala besar di KalTim. Setidaknya koneksi itu akan mengamankan relasi-relasi bisnis. Sebagai ilustrasi, biasanya yang menjadi petugas *land-compensation* di perusahaan tambang adalah jaksa atau polisi – baik yang masih aktif maupun sudah purnawirawan.²⁷

Situasi politik di KalTim merefleksikan bahwa relasi politik ala Orde Baru yang berbentuk segitiga kuasa antara militer – birokrat – parpol tersebut masih lestari. Dalam suatu keluarga elit politik, bisa dipastikan terdiri dari beberapa anggota keluarga yang berafiliasi dengan partai politik yang berbeda. Ini adalah strategi pemenangan Pilkada. Meski elit lokal memiliki peran yang sangat penting, namun tampak bahwa elit lokal hanyalah bidak catur bagi elit nasional. Bagi elit lokal yang tidak patuh pada elit nasional, berpotensi terseret pada persoalan hukum yang serius –misalnya tersandung skandal korupsi. Salah satu contoh elit lokal

24 *Ibid.*

25 Wawancara dengan Bernard (nama responden disamarkan) salah satu anggota kelompok Pokja *Good Governance* Kaltim, pada tanggal 13 Juli 2013; pukul 21.00-23.45 di Samarinda, Kaltim.

26 Dari : <http://www.kabarenergi.com/berita-sepenggal-kisah-miliarder-batubara-kiki-barki.html>, diakses pada tanggal 26 November 2013; 3:15 pm.

27 Wawancara dengan anggota kelompok Pokja, *Ibid.*, *op.cit.*

yang tidak cukup harmonis dengan elit nasional adalah kasus terseretnya Syaukani (mantan Bupati Kutai Kertanegara) dalam kasus korupsi.

Pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP) bisa sangat rumit dan lama, namun sebaliknya, bisa juga sangat “cepat” dan “sederhana”. Tersedia jalur-jalur khusus bagi kelompok investor dengan rekomendasi yang kuat. Jalur proseduralnya adalah Dinas Kehutanan, kemudian ke Badan Pertanahan Nasional, kemudian Pemerintah Daerah bidang Ekonomi. Makin tinggi level birokrasi yang menerbitkan, maka makin tinggi biaya percepatan dan penyederhanaannya.²⁸

Untuk pelayanan pengurusan ijin, Pemda memiliki suatu “tim khusus” perijinan yang bekerja secara taktis menangani izin secara eksklusif. Sering terjadi penerbitan ijin asli-tapi-palsu (aspal) ganda yang dijual kepada para investor. Apabila muncul sengketa, maka yang dimenangkan adalah investor dengan kontribusi terbesar. Dengan kata lain, investor dengan sponsor atau rekomendasi terkuat. Sejak awal pembukaan tender, telah ditentukan jatah proyek bagi pengusaha-pengusaha tertentu. Di setiap tender tersebut sudah didesain siapa pemenangnya. Sejumlah praktek penerbitan ijin dan peta RTRW secara ganda merupakan kesengajaan. Praktek tersebut merupakan wujud komersialisasi birokrasi sekaligus manajemen konflik. Sementara itu dalam hal penjualan batubara, terdapat broker yang fungsinya menghubungkan antara perusahaan batubara dengan pembelinya (eksporter). Ada 3 (tiga) broker besar di KalTim, yaitu broker untuk pembeli/eksporter ke Amerika Serikat, Singapura, dan India.

Kondisi ijin pertambangan yang mudah diberikan oleh para penguasa di Kutai Kartanegara, serta “perselingkuhan” negara dan penguasa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, didukung pula oleh kelompok kekuatan “pengaman” yakni Pemuda Pancasila (PP). Pemuda Pancasila merupakan salah satu aktor yang berperan pula dalam alur dari hulu-hilir eksploitasi batubara di Kukar. PP “bermain kecil-kecilan” dalam soal kebutuhan transportasi hasil pertambangan, pembebasan lahan, dan juga keamanan perusahaan tambang. Jika ada seseorang/perusahaan yang menambang tanpa melibatkan PP, maka perusahaan tersebut akan “diganggu”.²⁹ Caranya adalah dengan memprovokasi warga disekitar tambang ini untuk menyerang perusahaan tambang. Lalu Pemuda

28 *Ibid.*

29 Wawancara dengan Kahar Al Bahri, *Ibid.*, *op.cit.*

Pancasila akan datang dan mengatakan bahwa mereka menyelesaikan masalah keamanan ini. Padahal sebenarnya, kelompok merekalah yang membuat masalah tersebut.

Isu politik identitas dalam permainan kuasa pertambangan

KalTim relatif berbeda dengan KalBar dan KalTeng terkait perihal etnisitas. Isu etnisitas di KalTim masih laku “dijual” sebagai komoditas politik terutama di Kabupaten Kutai Kertanegara. Pada masa bupati Kukar Syaukani HR berkuasa upaya memainkan isu identitas mulai dihidupkan. Salah satunya dengan menghidupkan kembali Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang dipilih sebagai simbol “bangkitnya” Kukar. Dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai dengan motivasi sebagai upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya, mengingat kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Dihidupkannya kembali kesultanan Kutai dimaksudkan untuk mendukung sektor pariwisata Kalimantan Timur.³⁰

Namun, upaya membangun citra ini nampaknya tidak dengan niat yang sungguh-sungguh membangun kebudayaan lokal. Pemerintah daerah mereplika Kesultanan Kutai dengan memunculkan Festival Erau, sebagai contoh, yang tidak sesuai dengan makna Festival tersebut. Ia hanya menjadi komoditas budaya para penguasa di Kukar.

Festival Erau yang menunjukkan budaya yang berbasis pada air ia hanya muncul menjadi “etalase budaya” belaka ketika separuh lebih dari wilayah Kutai Kertanegara sudah dipenuhi oleh ijin eksploitasi pertambangan dan masyarakat tidak lagi berdaulat atas air. Akibat adanya pertambangan sungai-sungai di Kutai Kertanegara telah tercemar tambang. Festival Erau pun menjadi simbol penguatan identitas suatu kelompok etnis tertentu yaitu Kutai dan meredam identitas yang lain seperti budaya Dayak. Sehingga dengan upaya *replica*³¹ yang dilakukan pemerintah Kukar sekarang yang terjadi justru nampak sebagai “kerangkeng budaya”.

30 Mahandis Yoanata. “Kenali Titisan Kerajaan Kutai ing Martadipura,” diakses di Sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara. <http://kesultanan.kutaikartanegara.com/index.php?menu=Sejarah> pada tanggal 31 Oktober 2013 pukul 16.35 Wib

31 Konsep *replica* atau replika merujuk pada upaya kehadiran kembali budaya masa silam yang sempat meng(di)hilang(kan) untuk dihadirkan pada budaya masa kini. Namun upaya kehadiran kembali budaya tersebut telah berganti fungsinya dan juga perubahan pemaknaan atas kemunculan kembali budaya tersebut. Lebih lanjut soal konsep *replica* dapat

Contoh lain tentang bagaimana isu politik identitas “dimainkan” dalam isu pertambangan seringkali dihubungkan dengan kepemilikan tanah pihak Kesultanan Kutai. Tanah-tanah yang sulit dilepas oleh masyarakat kepada pihak perusahaan biasanya memiliki beberapa tahapan. Pertama pihak preman akan “menggangu” dengan keamanan warga, jika warga tidak bertahan, maka ia akan segera menjual tanah tersebut. Namun bila warga tetap bertahan dengan gangguan para “preman” tersebut, maka gangguan tahap yang paling akhir dengan “memainkan” isu identitas. Warga yang tidak mau melepas tanahnya, maka dengan menunjukkan surat berstempel Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura membuat warga “takut” dan melepas tanah tersebut. Surat berstempel kesultanan itu masih laku secara politis.³² Bahkan dari daftar sengketa tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim, salah satunya adalah soal stempel surat Kesultanan Kutai yang diklaim sebagai hak milik.³³

Tidak hanya soal isu etnisitas dan politik identitas di Kutai Kertanegara dimainkan pihak penguasa masa kini, namun isu ini selalu dimainkan oleh setiap rezim. Salah satu contoh adalah soal dislokasi dan disposisi suku Dayak dari pedalaman di hulu menuju ke perkotaan di hilir pada masa Orde Baru. Lalu kristenisasi – demikian pula dengan islamisasi – juga berperan determinatif dalam transformasi masyarakat Dayak sejak masa kolonial. Akibat peran kedua institusi tersebut, masyarakat Dayak pun tercerabut dari akar kosmologisnya, dan harus pindah dari tanah leluhurnya. Pada saat yang sama, terjadi penghancuran simbol-simbol fisik dan kultural masyarakat Dayak.

Peristiwa dislokasi suku Dayak terjadi pada tahun 1974 dan diintroduksi dalam bahasa “pembangunan” melalui program *Resettlement* Penduduk (biasa disingkat Respen). Program ini diinisiasi bersamaan dengan proyek Hak Pengelolaan Hutan. Kedua program ini berekses pada relokasi masyarakat Dayak yang tinggal di Mahakam Hulu untuk pindah ke Mahakam Hilir yang mendekati kota. Terdapat campur tangan sponsor asing, salah satunya dari Jerman, dalam pembangunan infrastruktur pada saat kedua proyek tersebut diinisiasi. TNI melalui divisi Babinsa juga

ditemui dalam Rachmi Diyah Larasati, *The Dance That makes You Vanish*, Minneapolis: Minnesota of University Press, 2013.

32 Wawancara dengan Kahar Al Bahri, *op.cit.*

33 Data daftar sengketa tanah BPN Provinsi Kaltim tahun 2011.

memiliki peran yang determinan dalam transformasi masyarakat, berikut fungsi-fungsi sosio-kultural.

Relokasi warga suku Dayak dari Mahakam Hulu dilakukan dengan alasan “modernitas”, diantaranya adalah alasan-alasan kesehatan dan pendidikan. Relokasi tersebut dibingkai melalui upaya untuk mendekatkan akses warga terhadap sekolah dan layanan kesehatan.³⁴ Ada pula upaya-upaya represif dalam merelokasi masyarakat Dayak. Bukan hanya dalam artian relokasi pemukiman, namun juga “relokasi kosmologis”. Terdapat rasa bangga apabila seorang Dayak merupakan orang terakhir yang masuk atau memeluk agama Kristen – ataupun memeluk agama Islam. Ditemukan suatu istilah yang unik ketika mereka menjelaskan masa lalu, misalnya dengan suatu anak kalimat “...dulu waktu kami masih kafir...”

Hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa soal politik identitas yang rentan dimainkan oleh para penguasa terhadap warga Kalimantan timur baik yang disebut sebagai penduduk “asli” maupun “pendatang”. Kerentanan posisi semacam ini, menyebabkan pihak penguasa yang saat ini berorientasi hanya pada soal ijin konsesi pertambangan maka dengan sangat mudahnya isu politik identitas ini “dimainkan”. Sehingga dengan isu ini, warga menjadi lebih mudah tercerabut dari tanah-tanah mereka.

Apa yang terjadi di Kutai Kartanegara merupakan sebuah gambaran soal *shadow state*. Pengertian *shadow state* adalah suatu kondisi wilayah yang memiliki pengaruh adalah para “pemilik modal”. Negara tunduk melayani pemilik modal, bukan kepada masyarakat. Adapun elemennya terdiri dari penguasa lokal, penguasa nasional dan pemilik modal, militer serta permainan politik identitas yang “menguasai” rangkaian alur hulu-hilir produksi pertambangan di Kukar. Gambaran situasi *shadow state* semacam ini telah menjadi semacam “pola” yang khas dari kondisi kota-kota tambang.³⁵ Kota pertambangan hanya menjadi “komoditas” bagi penyelenggara negara dengan membangun aliansi dengan elemen-elemen dalam masyarakat guna mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik jangka pendek yaitu dengan mengundang investor untuk bergabung dalam jaringan *shadow state*. Pemerintah membangun dan memberi

34 Yekti Maunati, *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. (Yogyakarta: LKIS, 2004).

35 Erwiza Erman, “Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka.” Dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: YOI dan KITLV, 2007.

perlindungan dengan memakai otoritas formal hanya bagi kepentingan modal belaka.

C. Sejarah Desa Kertabhuana dan Desa Lung Anai : Sebuah Perbandingan

Tulisan pada bagian ini akan membicarakan sejarah dua desa yaitu Kertabhuana dan Lung Anai terbentuk. Proses kesejarahan yang berbeda dari keduanya akan dijabarkan melalui perspektif historis. Pendekatan ini penting untuk melihat narasi masa kini yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari narasi masa lalu. Kedua desa ini menarik, meskipun berbeda karakter, untuk diteliti lebih lanjut karena keduanya saat ini terancam oleh pertambangan batubara.

Kertabhuana : Desa yang Menanti Ajal

Sepanjang jalan dari Samarinda menuju Kertabhuana, setidaknya ada 5 perusahaan tambang batubara berskala besar, yaitu Kayan Putrautama Coal (KPC), PT. Bukit Bauduri Energi (BBE), Kitadin, Banpu, dan Mahakam Sumber Jaya (MSJ). Para pemilik perusahaan tersebut dimiliki oleh sejumlah investor swasta dan dimiliki pula oleh pejabat-pejabat lokal.³⁶ Memasuki desa penelitian yang kami fokuskan dalam penelitian ini, kami seolah memasuki sebuah desa di pulau Dewata, Bali. Kami seolah menemukan “rasa” Bali dengan bertemu dengan penyebutan nama-nama yang bernuansa Bali: Made, Dewa, Dentri, Ayu, dst. Gerbang desa dengan simbol dewa ganesha menjadi penanda yang khas sebuah kampung Bali. Ketika memasuki rumah yang akan menjadi tempat kami menginap, kami disambut oleh sebuah pura yang sangat megah untuk ukuran sebuah dusun. Desa Kerthabhuana, sekitar tahun 1980an merupakan sebuah desa yang “dibentuk” oleh pemerintah Orde Baru sebagai desa transmigran. Tidak hanya Kertabhuana, beberapa lokasi di daerah Kutai Kertanegara merupakan desa-desa transmigran.

Adapun keberadaan Kertabhuana, menurut ingatan responden kami bapak Ketut³⁷ merupakan daerah yang memang sengaja dibentuk oleh

36 Keterangan ini didapatkan dari para warga, dan juga rekan jatom Kalimantan Timur selama mengantar kami menuju lokasi penelitian.

37 Untuk kerahasiaan responden, nama-nama responden dalam tulisan ini disamarkan.

pemerintah Orde Baru dalam program pemerintah transmigran. Pak Ketut dan rombongan merupakan transmigran generasi kedua dari desanya. Ia mengingat proses transmigrasi itu sebagai berikut:

“Pertama kali saya naik pesawat dari Bali ke Balikpapan, ada 300 ratusan orang yang berangkat. Saya berangkat bersama mereka. Mereka tidak hanya dari Bali tetapi juga dari Lombok dan Jawa”.

Pak Ketut memberi alasan mengapa mengikuti program transmigrasi karena di Bali ia tidak memiliki tanah. Awal mula informasi soal transmigrasi ini, Pak Ketut dapatkan dari kantor kelurahan. Pak Ketut lalu mengajak istrinya untuk mengadu nasib di Kalimantan. Semula ia mengira bahwa Kalimantan itu dekat, karena ada tetangganya yang sudah ikut mengatakan bahwa transmigrasi itu mudah dan tidak jauh dari kota. Namun, saat menginjakkan kaki di Balikpapan dilanjutkan dengan naik truck ke Samarinda menuju desa Kertabhuana. Ia baru menyadari bahwa lokasi bagi para transmigran itu jauh dari kota.³⁸ Kondisi yang tidak mudah dijalani tidak menyurutkan Pak Ketut dengan istrinya Ibu Semani³⁹ untuk membangun kehidupan di “tanah baru” tersebut, tanah yang bukan tempat kelahiran-nya.



Gambar 2. Pura di depan rumah keluarga Bapak Ketut
Sumber: Foto diambil pada tanggal 14 Juli 2013.

38 Wawancara dengan bapak Ketut, 14 Juli 2013; jam 14.00-16.00 di Kertabhuana, Kukar.

39 Nama responden disamarkan.

Demi kehidupan lebih baik mereka kemudian tinggal dan mengolah tanah di Kertabhuana. Terasa keterikatan antara manusia dan alam yang menghidupinya. Bagi keluarga Ketut tanah merupakan ikatan kosmologis yang tidak hanya berhubungan dengan soal sosial-ekonomi masyarakat Bali, namun juga spiritual. Kesuburan tanah dan hasil panen yang berlimpah diyakini merupakan anugerah dari Dewi Sri. Banyak ritual keagamaan orang Bali yang sangat tergantung pada hasil bumi. Seperti sesajen yang terdiri dari kelapa gading, bunga, dan juga air—yang bersal dari tanah juga—sebagai bagian dari aktivitas ritual keagamaan mereka. Keterikatan atas pengelolaan dan penguasaan tanah tersebutlah yang menjadi motivasi penting para warga Bali untuk bertransmigrasi ke pulau seberang yakni: Kalimantan.

Pak Ketut dan rombongan warga transmigran yang lain mulai mengolah tanah menjadi sawah. Pada awalnya tanah tersebut masih berupa hutan. Selain mengolah lahan menjadi sawah, para warga menanam buah-buahan, cabai, sayuran dan tanaman obat-obatan. Upaya ini dilakukan agar mereka tidak harus ke pasar untuk mendapatkan bahan kebutuhan sehari-hari. Apalagi kebutuhan air pada saat itu tercukupi.

Namun, keadaan tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun berikutnya kemarau panjang melanda desa ini sehingga masyarakat tidak bisa bertani. Di tengah keadaan yang serba susah, ketika itu masuklah PT Kitadin, sebuah anak perusahaan batubara PT. Indo Tambangraya Megah Tbk, yang berada dalam Banpu Public Company Limited (Perusahaan pertambangan dan energi asal Thailand). Karena membutuhkan banyak tenaga kerja, mereka merekrut penduduk dari desa untuk membangun mess perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Semani sebagai berikut:

Tidak lama sampai disini, pada tahun 1982 perusahaan sudah mulai rintis buka mess. Pak Ketut juga ikut jadi buruh, pas sedang kemarau panjang. Kita nanem kacang dan jagung, dimakan tikus. Pokoknya kalau kita tidak bertahan, ya susah. Pak Ketut kadang mendapatkan gaji 30.000,- rupiah tiap bulan.

Masyarakat merasa terbantu dengan kedatangan PT Kitadin di tengah kondisi yang menyulitkan. Hal ini diamini pula oleh Ibu Sasmita⁴⁰, warga transmigran asli Bali yang sudah menetap dari tahun 1982:

40 Nama samaran

Di Bali saya numpang, baru di sini saya dapat tanah. Waktu datang kesini, saya juga kerja di Kitadin, di mess. Mereka cari karyawan banyak, jadi langsung kerja. Dulu gajinya Rp 15.000,- per bulan di bagian naik-naikkan batubara. Dulu banyak kerja di Kitadin, termasuk ibu-ibu. Kalau tidak bekerja, bagaimana cari uang untuk beli beras karena beras jatah dari pemerintah kurang. Setelah pulang kerja dari Kitadin, saya menggarap sawah.

Program transmigrasi yang hampir bersamaan dengan pembukaan lahan untuk penambangan batubara di lokasi yang berdekatan, dapat dianggap sebagai kebijakan oleh pemerintah Orde Baru. Kebijakan ini menghitung perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Karena disisi lain, masyarakat transmigran butuh uang untuk bertahan hidup sehingga bersedia bekerja sebagai buruh tambang.

Perusahaan tambang dalam ingatan warga menjadi bagian dari perjalanan sejarah desa Kertabhuana. Hanya saja semenjak kedatangan mereka di Kertabhuana keberadaan perusahaan tambang tidak membuat mereka gelisah, karena eksplotasi pertambangan yang bersifat pertambangan tertutup. Beberapa warga bahkan bekerja di perusahaan tambang tersebut. Sedangkan jumlah perusahaan tambang hanya satu yakni PT. Kitadin.



Gambar 3. Salah satu areal pertambangan yang dieksplotasi di Kertabhuana
Sumber: Foto diambil tanggal 13 Juli 2013

Setelah pasca otonomi daerah, penambangan di Kertabhuana menjadi tidak terkontrol. Banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi

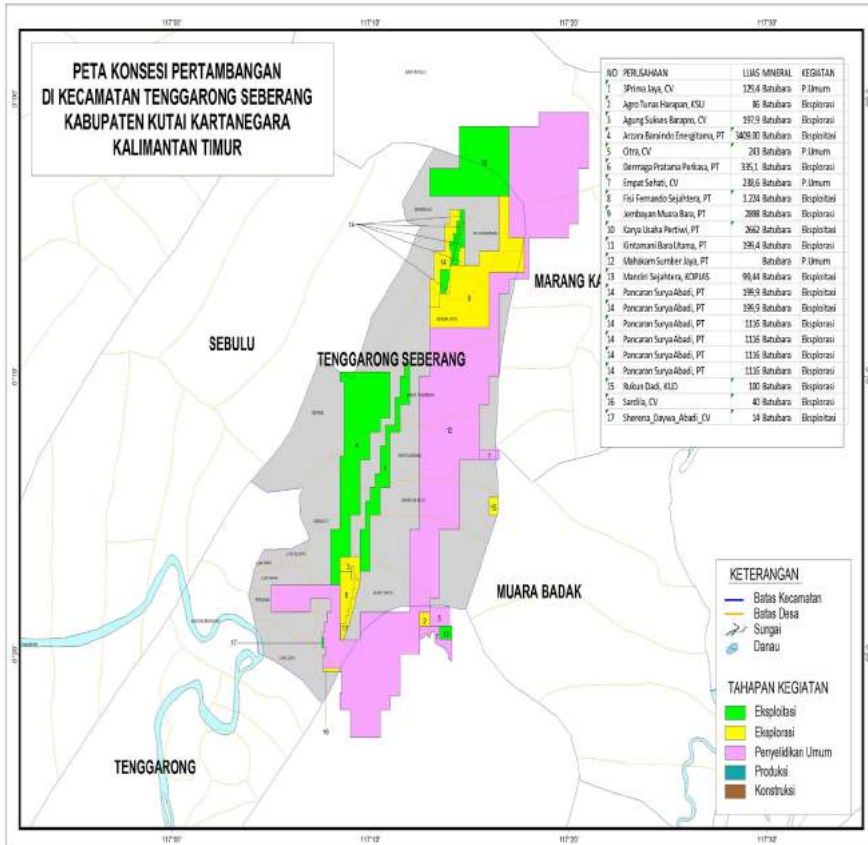
membuat kualitas udara semakin buruk. Anak-anak tidak memiliki tempat bermain, karena sawah-sawah mulai berganti menjadi areal pertambangan dengan lobang-lobang besar setelah pengerukan tanah-tanah tersebut. Akibatnya, untuk kesekian kalinya, kecelakaan terjadi di pertambangan PT Kitadin Banpu. Longsor pada 31 Januari 2006 lalu mengakibatkan tiga korban tewas. Kecelakaan ini merupakan akumulasi pengelolaan tambang yang buruk dan berlangsung sejak lama dengan dukungan penuh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah dan penduduk lokal harus menanggung biaya-biaya sosial serta rusaknya sungai dan lahan produktif.

PT Kitadin mengoperasikan tambang batubara di Kecamatan Tenggarong Seberang sejak tahun 1981. Luas konsesi perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh kelompok Banpu Thailand itu kini mencapai 2.974 Ha setelah beberapa kali mengalami perluasan. Sejak mulai beroperasi di tahun 1983, kecelakaan di tambang Kitadin sudah belasan kali terjadi; akibat terowongan longsor maupun kekurangan oksigen. Pasca kecelakaan di terowongan, tambang batu bara milik PT Kitadin ditutup. Agar dapat terus melakukan produksi, perusahaan melakukan penambangan terbuka tidak jauh dari pekarangan milik penduduk Desa Kerthabuana, terutama Blok C1. Perusahaan membujuk warga untuk menjual tanahnya pada PT Kitadin melalui jasa calo yang juga warga Desa Kertabhuana.



Gambar 4. Tugu PT. Kitadin yang terletak di pertigaan jalan menuju desa Kertabhuana
Sumber: Foto diambil tanggal 16 Juli 2013.

Bujukan para calo mengusik beberapa orang untuk menjual tanahnya kepada PT. Kitadin. Salah satu warga Lombok menjual tanahnya sebagai ongkos pergi naik haji dan membelikan emas untuk istrinya. Setelah pulang haji dia tidak memiliki tanah lagi. Namun karena dia sudah berpredikat haji, maka dia merasa sebagai orang terpendang di desa.



Gambar 5. Peta konsesi pertambangan di kecamatan Tenggarong Seberang dimana desa Kertabhuana masuk kedalam wilayahnya.

Sumber: Jatam, tahun 2009.

Berbeda dengan beberapa masyarakat Bali yang menganut agama hindu. Mereka berusaha mempertahankan tanah karena menurut kepercayaan mereka tanah dianggap suci. Bentuk penghormatan mereka adalah apabila musim panen, mereka membuat sesajian sebagai bentuk persembahan pada Dewi Sri. Sebagai strategi untuk mempertahankan

tanah, orang Bali membuat pura di depan rumah. Untuk membuat pura mereka harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Dengan demikian, ketika perusahaan mau membeli lahan penduduk, perusahaan juga harus membayar harga pura. Sehingga harga jual dari lahan menjadi sangat tinggi. Sedangkan untuk pembuatan pura pasopati, pura didepan bapak Ketut, menghabiskan uang yang lebih tinggi lagi.

Desa Lung Anai: Cerita dari Kampung Dayak yang Tersisa

Lung Anai adalah desa yang dihuni oleh suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan. Sebelum menjadi desa, Lung Anai merupakan dusun yang menjadi bagian dari Desa Sungai Payang. Setelah adanya pemekaran desa-desa, maka warga Lung Anai mengajukan diri sebagai desa tersendiri dan terpisah dari Desa Sungai Payang. Demi meraih kemajuan bagi Lung Anai, para pemuka adat dan elit desa meminta persetujuan dari pemerintah Kabupaten untuk menjadi Lung Anai sebagai desa budaya.

Penetapan Lung Anai sebagai desa budaya pun sempat memunculkan perdebatan, terutama terkait untung rugi. Keuntungan bagi warga Lung Anai, ketika menjadi desa budaya, hak atas tanah perkampungan mereka menjadi terjamin. Namun, ladang-ladang mereka secara administratif berada di luar wilayah desa mereka menimbulkan kekhawatiran, karena tanah-tanah tersebut belum terdaftar menjadi hak milik warga Lung Anai. Padahal ladang merupakan bagian dari budaya bagi masyarakat Dayak Kenyah sejak zaman nenek moyang mereka.

Mata pencaharian utama sehari-hari penduduk Lung Anai adalah berladang berpindah. Ladang-ladang warga terletak jauh dari desa, sehingga terkadang mereka bermalam di pondok dekat ladang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penduduk mengandalkan hasil ladang, baik padi maupun sayuran. Selain berladang, penduduk juga bekerja di pemerintahan desa, berdagang dan menjual hasil kerajinan khas dayak yang terbuat dari manik-manik maupun rotan.

Selama di desa Lung Anai, kami tinggal di rumah Mamak. Ia tinggal bersama dengan anak, menantu dan juga adiknya. Mamak adalah warga perintis di desa Lung Anai ini. Desa ini hampir seluruhnya dihuni oleh orang Dayak Kenyah. Mamak berasal dari Apokayan, suatu daerah di Mahakam Hulu yang berbatasan dengan wilayah Malaysia. Sejak masih gadis, Mamak ikut orang tuanya bermigrasi ke Hilir. Masa kecil Mamak

masih merasakan tinggal di rumah panjang Dayak (rumah lamin). Saat ini Mamak tinggal menetap di desa Lung Anai. Alasan utama migrasi yang dikemukakan oleh mamak agar anak-anak Dayak Kenyah dapat melanjutkan pendidikan menengah.

Migrasi tersebut berlangsung selama puluhan tahun secara bertahap. Mamak menyebutkan satu-persatu daerah yang pernah mereka diami. Di setiap tempat, warga Dayak Kenyah membuka ladang padi. Tradisi menanam padi sudah terjadi turun-temurun. Jalur yang dilalui berkombinasi antara belukar dan sungai. Saat ini Mamak berladang padi, karet, dan coklat. Ketika baru menetap di Lung Anai, suami Mamak meninggal. Mamak mendapat ladang untuk padi, karet, dan coklat dari tanah orang Kutai. Mamak mengelola sendirian seluruh lahannya. Ladang Mamak tidak terlalu jauh dari desa sehingga aman dari gangguan.

Untuk mengetahui sejarah desa ini, kami mewawancarai Bapak Pendeta Ungau Njau. Warga Dayak Kenyah menjadi penganut Kristen Protestan sejak pertengahan tahun 1937 melalui misionaris asal Amerika Serikat di daerah Mahakam Hulu. Ketika itu, Pendeta Ungau adalah pemuda Dayak Kenyah paling awal yang bersekolah di seminari Bulungan. Pendeta Ungau kembali ke Mahakam Hulu sepulang sekolah seminari. Ia pindah ke hilir pada tahun 1964 karena terlalu sulit menyekolahkan anak. Pada saat itu terjadi konfrontasi dengan Malaysia sehingga ia diperintahkan oleh Komandan Operasi GM 1 (Ganyang Malaysia) untuk merelokasi warganya ke hilir Mahakam. Motif lain adalah supaya lebih dekat dalam menyekolahkan anak-anak warga. Komandan TNI yang memerintahkan Pendeta Ungau bernama Ruddy Manoppo (asal Manado).

Pendeta Ungau tiba di Loa Kulu bersama rombongan dari Apokayan (perbatasan Malaysia). Ribuan orang Dayak Kenyah bermigrasi dari Pokayan ke Samarinda, Tarakan, Tanjung Kelor, dan tempat-tempat lain. Ada juga yang migrasi ke Malaysia. Perpindahan melalui jalur darat dilakukan dengan berjalan, dan kadang-kadang menyusuri sungai dengan perahu. Jarak Pokayan lebih dekat ke Malaysia, namun warga memilih migrasi ke Samarinda. Memilih tinggal di Lung Anai karena dekat Tenggarong. Ketika warga tiba di Loa Kulu, sudah ada pemukim, namun belum terkoordinir sebagai penduduk dalam suatu kampung.

Dulu daerah Lung Anai dikenal dengan nama Gunung Tanah Merah. Di daerah ini sudah ada usaha perkayuan dari Amerika bernama ICI. Desa

Long Anai sendiri belum lama terbentuk. Desa ini baru terbentuk setelah diresmikan sebagai Desa Budaya untuk warga Dayak Kenyah. Nama Long Anai diambil dari nama kampung Dayak Kenyah ketika masih di Pokayan dulu. Saat ini Pokayan di Mahakam hulu telah menjadi ramai penduduk kembali karena ada perkebunan sawit. Dahulu di Pokayan banyak emas yang dapat diayak di sungai-sungai. Bahkan ada perusahaan bernama Marunda yang menambang emas di Pokayan.

Ketika Pendeta Ungau tiba di Loa Kulu, kampung-kampung warga masih sangat berjauhan dan belum ada transmigrasi. Setelah tetap bermukim, maka didirikanlah Gereja Long Anai pada tahun 1988. Selain Long Anai, ada pula kampung Dayak Punan di desa Baseb.

Sejak tahun 1955 Pendeta Ungau telah menjadi Pendeta. Ketika sekolah seminari di Bulungan, sudah banyak orang Dayak bersekolah di sana, bukan hanya orang Kenyah. Ia sendiri bisa sampai sekolah seminari karena diajak misi oleh PN Potu asal Palu. Sesampai di sekolah seminari, banyak orang-orang Dayak yang memotong telinga panjangnya, dan juga tidak lagi bertatoo. Sebelum memeluk agama Kristen, Pendeta Ungau memiliki kepercayaan Bungan yang menghormati hewan dan burung. Diceritakan bahwa dulunya orang Dayak Kenyah sering perang dengan orang Dayak Iban. Sesama Kenyah pun kadang saling berperang dengan alasan berebut pangan, sebab kemiskinan, ataupun adanya perkosaan. Semenjak menjadi Kristen, orang Kenyah tidak lagi berperang.

Pendeta Ungau dan keluarganya tiba di Loa Kulu tahun 1965. Sebelumnya ketika masih di Mahakam Hulu, keluarga Pendeta Ungau masih tinggal di rumah panjang (rumah betang). Dalam 1 rumah betang ada 40-70 keluarga. Saat ini warga Kenyah tidak lagi tinggal di rumah panjang karena alasan kesehatan – sebagaimana dianjurkan oleh Mantri Kesehatan yang kerap melakukan penyuluhan. Untuk alasan keamanan juga, sebab rumah betang sangat beresiko terjadi kebakaran.

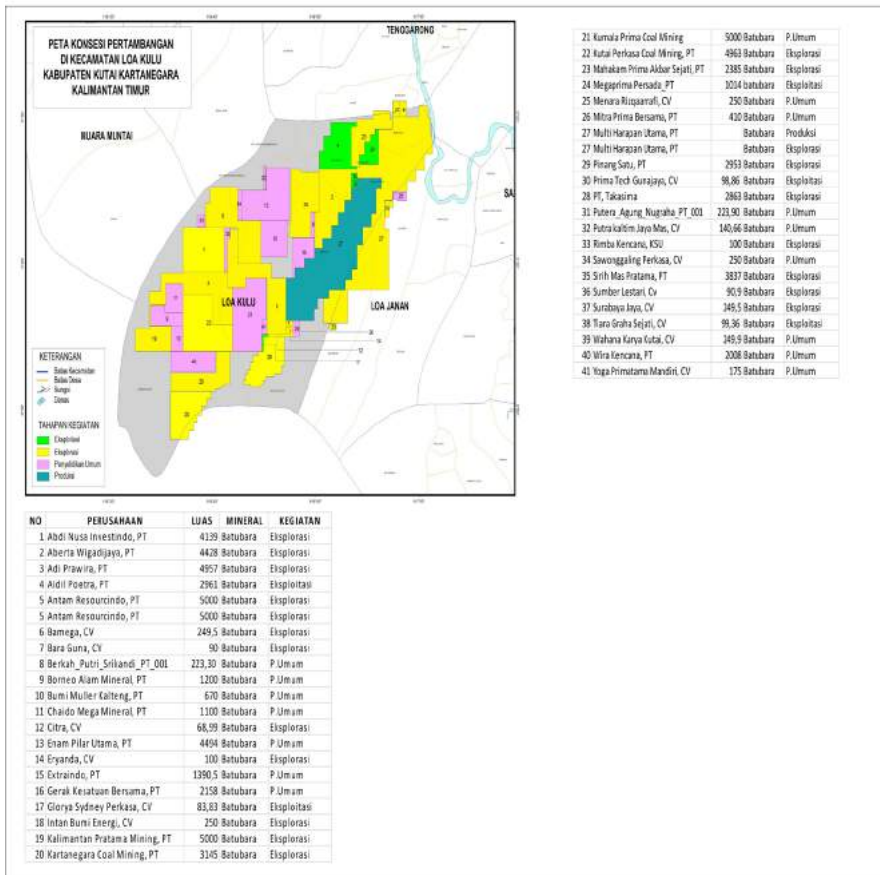
Selain alasan untuk memberadabkan dan memodernkan dalam kebijakan program relokasi itu, kerap kali terdapat kaitan langsung antara dipindahkannya penduduk asli dan diesploitasinya sumber daya alam, contohnya seperti kayu dan mineral berharga. Selain itu, keterkaitan antara eksploitasi sumber daya alam dengan relokasi penduduk bukan hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat politis yaitu berkaitan

dengan keinginan negara untuk menentukan identitas warga negaranya. Misalnya pada orang Dayak terjadi transformasi gaya hidup nomaden menjadi kehidupan tinggal menetap di desa yang permanen terikat erat dengan proyek pemberadaban yang dilakukan oleh pemerintah.⁴¹ Pada tahun 1970-an, banyak perusahaan kayu yang masuk ke wilayah ini. Saat itu warga Dayak Kenyah tidak terlibat dalam penebangan kayu yang dilakukan perusahaan. Hal ini karena mereka lebih memilih berladang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ketika kayu sudah habis, perusahaan beralih pada ekstraksi batubara. Saat itulah dimulai periode eksploitasi batu bara. Di daerah lain, perkebunan sawit merambah terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan penambangan batu bara.

Waktu berganti, Lung Anai yang dahulu dieksploitasi kayunya, saat ini mulai ditambang. Perusahaan yang mengeksploitasi batubara di sekitar Lung Anai diantaranya adalah PT Multi Harapan Utama (MHU) dan PT Mega Prima Persada (MPP). PT MPP memiliki luasan tambang yang mencakup desa Sungai Payang, Desa Jembayan, Desa Rempanga, Desa Jembayan Dalam. Desa Lung Anai memang tidak masuk di dalam wilayah penambangan batu bara. Namun, ladang-ladang milik warga terletak dekat area penambangan batubara karena masuk ke desa-desa yang digempur pertambangan, sehingga penambangan batu bara jelas mengancam ruang hidup penduduk Lung Anai yang mengandalkan ladang berpindah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain dekat dengan area penambangan PT. MPP dan PT. MHU, Desa Lung Anai juga dekat dengan wilayah penambangan PT. Rinjani, PT. KKE, PT. Beringin, dan PT. MGE.

Untuk mengatasi persoalan di masyarakat akibat dampak penambangan batubara, PT MPP memberikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK). Forum ini adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang diketuai oleh Rudiansyah yang dibentuk pada tahun 2009. Untuk memudahkan koordinasi di tingkat desa, dibentuklah forum di tingkat desa sekitar tambang. Diantaranya di Desa Sungai Payang, Desa Jembayan Tengah, Desa Jembayang Induk, Desa Jembayang Dalam, Desa Panoragan, Desa Loakulu Kota, Desa Loh Sumber, Desa Rempanga, Jonggon Desa dan Desa Lung Anai.

41 Yekti Maunati, *Ibid.*, *op.cit.*



Gambar 6. Peta konsesi pertambangan di Loakulu
Sumber: JATAM, tahun 2009.

PT. MPP melalui FPMLK memberikan 12 mobil di 12 desa untuk kegiatan sosial masyarakat. Mobil tersebut merupakan salah satu bentuk bagi hasil PT. MPP yang menggarap 1000 hektar lahan batu bara milik FPMLK. PT MPP mulai menggarap lahan tersebut sejak Februari 2009, selanjutnya pada April lalu FPMLK mendapatkan bagi hasil dengan kontrak 2,5 USD/metrik ton dari hasil tambang, yaitu sebesar Rp 1,7 miliar. Serta bagi hasil selanjutnya yang telah diterima oleh FPMLK yaitu di bulan Juli tahun 2009 sebesar Rp 5, 8 miliar. Dengan dana tersebut FPMKLK telah menyusun program untuk 12 desa di Loa Kulu yaitu

untuk pendidikan dialokasikan dana 20 persen, Kesehatan juga 20 persen, keagamaan 10 persen, infrastruktur 25 persen, dan kepemudaan 10 persen.⁴²

Menurut salah satu warga, Desa Lung Anai sendiri mendapatkan dana sebesar Rp 200.000.000,- setiap bulan dari para perusahaan yang menambang disekitar desa. Jumlah ini kalah besar dibandingkan dengan desa lain yang terkena dampak langsung dari penambangan. Menurutnya, uang sebesar Rp 200.000.000 setiap bulan tetap tidak sebanding batubara yang diambil oleh PT MPP. Apalagi pemberian dana tersebut pun beberapa kali tersendat. Keterlambatan dana kompensasi untuk desa terjadi selama 6 sampai 9 bulan sehingga desa melaporkan masalah tersebut ke DPRD Kukar. Selain itu, penyerahan dana kompensasi itu sendiri dituding dilakukan tidak transparan. Pihak desa tidak mengetahui secara persis berapa nilai nominal uang kompensasi yang diberikan PT. MPP ke forum pemerhati masyarakat Loa Kulu.⁴³

Permasalahan lingkungan muncul ketika operasi PT MPP di wilayah Loa Kulu telah mengakibatkan persawahan warga, khususnya di Jembayan Dalam menjadi terendam limbah. Kondisi tersebut sangatlah merugikan masyarakat. Pencemaran lingkungan akibat limbah PT MPP itu terjadi lantaran tidak tersedianya pengolahan limbah asam tambang; tidak ada kolam penampungan air limbah; tidak ada penampungan KB-3; dan tanggul batas areal tambang dengan pertanian dinilai kurang tinggi.⁴⁴ Persoalan ini mendorong masyarakat Jembayan Dalam mengadu kepada DPRD Kutai Kartanegara. Hasilnya, Komisi II DPRD Kukar merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menutup sementara operasi PT MPP, sebelum perusahaan melakukan ganti rugi dan pembenahan penampungan air limbah yang diduga sebagai sumber terjadinya pencemaran lingkungan. Penggunaan dana kompensasi pun tidak terlalu jelas peruntukannya.

42 FPMLK Terima 12 Mobil Sosial. <http://www.vivaborneo.com/1096.html> diakses pada 29 Oktober 2013 pukul 07.30 WIB

43 DPRD Desak Kompensasi MPP Loa Kulu Masuk Pendapatan Desa, dari: <http://www.poskotakaltim.com/berita/read/10688DPRD%20Desak%20Kompensasi%20MPP%20Loa%20Kulu%20Masuk%20Pendapatan%20Desa> diakses pada 29 Oktober 2013 pukul 07.45 WIB.

44 PT. Mega Prima Persada Diminta Ditutup, dari: <http://www.poskotakaltim.com/berita/read/7822PT%20Mega%20Prima%20Persada%20Diminta%2> Ditutup diakses pada 29 Oktober 2013 pukul 09.57 WIB

D. Tanah, Pangan, dan Batubara: Tutur para perempuan ditengah gempuran pertambangan

Arti Tanah bagi para perempuan Bali

Kedatangan kami sore itu disambut oleh hujan yang sangat deras. Beberapa kali roda mobil yang kami tumpangi berjuang dari jebakan jalan yang berlobang dan jalan yang masih berupa jalan tanah. Namun, tak berapa lama, sesaat kami tiba di rumah yang kami tempati di desa Kertabhuana, kami langsung disambut dengan sukacita.

Perempuan setengah baya itu, tampak sangat sehat dan energik. Meski usia sudah memasuki 60-an tahun, namun seolah tak ada hari pensiun baginya. Ibu Semani namanya. Seorang perempuan pemangku adat Bali di Desa Kertabhuana. Ibu Semani pemilik rumah itu, seorang yang sangat periang, dan senang bercerita tentang semuanya. Dari ibu Semani kami mengetahui soal bagaimana perjuangan para perempuan mempertahankan tanah-tanah impian mereka. Ibu Semani memiliki status sosial yang tinggi karena berasal dari kasta ksatria, kasta yang paling tinggi diantara warga penduduk di desa Kertabhuana. Ibu Semani setiap hari menyiapkan makanan untuk keluarga maupun menyiapkan sesajen untuk ritual ibadahnya. Bagi penganut agama hindu, ritual sesajen dimulai di pagi hari, setelah bangun dari tidur, dan membersihkan diri/badan. Adapun sesajen yang diberikan adalah pisang kecil (pisang mas), kelapa (gading), bunga serta air suci. Bahan sesajen itu semuanya berasal dari hasil tanah mereka. Jika pun tidak ada, mereka harus membelinya, dan hal itu tentunya menyulitkan bagi mereka, karena kebutuhan semacam ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lain hal-nya jika mereka memiliki ladang menghasilkan bahan-bahan sesajen tersebut, tentunya akan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung.

Sangat tidak mudah bagi penduduk Bali ini untuk melepaskan tanah-tanah mereka, apalagi kepada pihak pertambangan. Ibu Semani sendiri mengalami perubahan pandangan saat ditanya kondisi terakhir tentang pertambangan dengan dikaitkan kepada, penjualan warga terhadap tanahnya. Warga melakukan siasat dengan selalu menaikkan harga tanah kepada pihak perusahaan saat dari pihak perusahaan menawar harga. Namun, dengan adanya ijin IUP yang jorjoran, dan didukung oleh pihak

pengusa, maka, mau tidak-mau, suka-tidak suka, akhirnya para penduduk mulai menjual satu persatu tanah mereka.

Sekira awal tahun 2003 ibu Semani dan warga lainnya sempat pula menolak penjualan tanah-tanah mereka kepada perusahaan-perusahaan di sekitar desa Kertabhuana. Ibu Semani berusaha untuk meyakinkan kepada para pemuda agar berdemo terhadap perusahaan atas kondisi lingkungan yang semakin tercemar.

Hanya saja kondisi pertahanan warga Kertabhuana semakin menipis saat kami temui medio bulan Juli tahun 2013. Tanah Ibu Semani sendiri seluas 2 hektare akhirnya dilepas juga dengan harga sebesar Rp. 1,2 Milyar. Ibu Semani mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak menyangka bahwa perusahaan akan membeli tanahnya saat ia menaikkan harga tanahnya setinggi mungkin. Namun, apa lajur nasi sudah menjadi bubur, tanah sudah terlepas. Akibatnya tanah di sekitar areal tambang Batubara di Kertabhuana menjadi agak sulit dijual, karena warga meminta pelepasan tanah dengan harga yang sangat tinggi. Namun pelepasan tanah tetap banyak terjadi saat pihak perusahaan menyanggupi harga tanah tersebut.

Keluarga Ibu Semani merasa kecolongan, karena ia hanya bermaksud untuk membuat para pengejar tanahnya itu berhenti. Namun ternyata perusahaan mengabaikan hal tersebut. Akibatnya penduduk desa mulai “melirik” untuk menjual tanah-tanah mereka. Warga desa Kertabhuana yang lain pun akhirnya menyatakan bila harga-nya sesuai maka mereka akan menjualnya pula. “..bila sesuai dengan harga.. ya kami akan melepasnya....” ujar Syamsyiah.

Agenda ekonomi liberal berdampak nyata pada mata pencaharian masyarakat pedesaan, dan keterhubungan masyarakat terhadap tanah sebagaimana yang dialami para perempuan di desa Kertabhuana.⁴⁵ Ketersingkirannya para perempuan atas tanahnya ini, merupakan soal yang tidak dapat dipungkiri sebagai perlawanan akhir, ketika kondisi lingkungan sudah semakin sulit dirasakan kenyamanannya. Jalan berdebu oleh mobil-mobil perusahaan pengawas pertambangan, ataupun truck-truck serta bus-bus karyawan para pekerja tambang yang berseliweran mulai dari pagi hingga pagi kembali. Operasi pertambangan tidak pernah berhenti.

45 Razavi, S. (2003). “Introduction: Agrarian Change, Gender and Land Rights.” *Journal of Agrarian Change* 3 (1-2): 2-32.

Suara bising yang tidak berhenti selama 24 jam sudah menjadi langganan “lagu“ dalam pendengaran warga Kertabhuana. Udara pengap dan penuh dengan debu yang pekat. Generasi kedua keluarga transmigran ini pada akhirnya menjadi tersingkir dari tanahnya dan menjadi proletariat kembali. Mereka terlempar kembali menjadi para warga yang tanpa tanah.

Ditengah gempuran tambang tersebut, dengan sebagian tanahnya yang masih tersisa Ibu Semani menggugat:

“dulu kami datang kesini agar kami punya tanah. Lalu kenapa kami harus kehilangan tanah kembali karena adanya areal pertambangan ini?”

Kisah (Perempuan) Generasi Kedua dan Tanah yang Hilang

Berjalan agak jauh dari rumah keluarga Bapak Ketut dan Ibu Semani, kami mendekati areal pertambangan dengan melewati beberapa rumah warga khas transmigran. Struktur bangunan rumah kayu ulin tampak tegak dan kokoh. Meski sudah rapuh di pojok-pojok rumah dengan tambahan sebagian dinding batu semen, namun masih terlihat sisa-sisa bangunan utama. Di panggung rumah dengan topangan kayu besi itulah kami berbincang di teras rumah keluarga Ahmad.

Keluarga Ahmad merupakan keluarga etnis Kutai yang datang pada gelombang transmigran kedua setelah keluarga Pak Ketut. Syamsyah istrinya adalah seorang Kutai yang berasal dari Embalut. Embalut merupakan desa/kecamatan yang bersebelahan dengan kecamatan Tenggarong Seberang. Adapun Bapak Ahmad sendiri adalah orang Bugis.

Mereka menjadi warga penduduk desa Kertabhuana mengikuti keluarga mereka sendiri yang sudah masuk dahulu ke desa tersebut pada tahun 1980-an. Mereka masih mempertahankan tanahnya karena merasa tanah yang ditawarkan kepada mereka masih belum cocok. Keluarga ini merasa sudah tidak mampu mempertahankan tanah sawah yang mereka miliki. Mereka siap melepaskan tanahnya untuk berganti pemilik dan siap untuk ditambang.

Mereka berfikir, apa lagi yang akan diharapkan dari situasi rumah yang di sekelilingnya telah dikepung oleh areal pertambnagan? Tanah yang digarap pun sudah menyusut produksinya. Mereka mengatakan bahwa dari uang yang akan mereka dapatkan, pilihan pertama adalah memiliki tabungan. Rencana mereka tahun ini akan berangkat haji. Namun mereka

merasa bahwa kehilangan tanah tentu saja sangat menyesakkan dada. Mereka mengatakan:

“...sebetulnya tidak punya tanah lagi itu sangat disesalkan... buat apa banyak uang namun keadaan hidup susah begini? Air susah di dapat, udara berdebu, gatal-gatal, dan suara yang bising sangat mengganggu sepanjang waktu..”⁴⁶

Aktifitas penambangan selalu berjalan pagi, siang maupun malam. Aktifitas berhenti sementara waktu karena hujan lebat, sehingga sulit bagi para pekerja meneruskan kegiatannya. Keluarga ini telah kehilangan sebagai besar sawahnya, dan mereka sudah sangat ingin pergi dari desa itu, karena sudah sangat tidak nyaman. Mereka akan menjual tanah pekarangannya yang tersisa bila sudah menerima harga yang cocok dari perusahaan. Apa yang akan mereka kerjakan bila ternyata perusahaan menyetujui harga yang mereka sepakati? Mereka mengatakan akan mencari tanah lain di luar daerah Tenggarong yang menurut mereka masih banyak tanah yang murah diluar desa Kerthabuana.

Dyna adalah perempuan generasi kedua para transmigran yang sudah tidak bisa lagi memiliki akses terhadap tanahnya. Sejak kelulusannya dari sekolah menengah atas (SMA), Dyna sudah bekerja di dua tempat yang berbeda. Ia sempat bekerja di Samarinda sebagai pelayan restoran dan juga penjaga sebuah toko. Namun kedua tempat itu telah ia tinggalkan karena merasa tidak betah.

Dyna mengingat bagaimana masa-masa kecilnya dahulu di sekitar lapangan dan sungai yang kini sudah “ditimbun” untuk menjadi “pembatas” areal pertambangan dan sebagian sawah yang masih ditanami. Sawah yang luas tempat berkumpul semua warga saat panen, pada akhirnya saat ini hanya tinggal pemandangan hamparan tanah yang berlubang akibat dikeruk oleh alat-alat berat dan truck-truck yang lalu-lalang mengangkut batubara.

Dyna hanya memiliki sisa harapan agar tanah pekarangannya yang sekarang tersisa dibeli oleh perusahaan. Dyna mengatakan bahwa ia merasa tidak lagi bisa memiliki usaha/upaya yang dapat untuk mempertahankan tanah-tanah mereka, karena bagaimana mereka akan mengolah sawah jika penambangan hanya berjarak 50 meter saja dari tanah sawah mereka? Selain karena tanah orang tuanya yang sebagian telah tergusur tambang,

46 Wawancara dengan Ibu Syamsyah (bukan nama sebenarnya), 15 Juli 2013, Jam 14.00-16.00, di Kerthabuana, Kutai Kertanegara.

Dyna pun merasa sudah tidak tertarik lagi menggarap tanah tersebut, sehingga tanah yang tersisa pun tidak akan dia pertahankan. Menurutnya lebih tertarik “uang penjualan tanah” tersebut dan akan digunakannya untuk pergi jalan-jalan bertemu dengan artis di Jawa. Adapun yang mereka tahu sekarang adalah tanah-tanahnya hanya tinggal menunggu giliran saja untuk digusur oleh pertambangan. Tanah yang mereka cari saat transmigrasi dulu harus mereka “relakan” untuk pertambangan. Tanah-tanah mereka yang sempat menjadi lumbung padi bagi Kaltim itu terancam tergusur, yang bisa terjadi tahun depan, bulan depan, atau mungkin besok hari. Tinggal menunggu giliran saja.

Kisah tanah- tanah yang diperebutkan

Rumah Mamak berada di pinggir sungai Jembayan. Kehidupan warga Dayak Kenyah Lapoq Jalan yang erat dengan kehidupan sungai membuat posisi rumah Mamak menjadi strategis untuk bertemu banyak orang karena disebabkan, persis di depan rumah Mamak, oleh adanya “pelabuhan” kecil. Pelabuhan ini merupakan tempat para warga desa Lung Anai saat akan bepergian maupun baru saja tiba. Tempat perjumpaan ini sangat ramai pada pagi hari dan juga pada sore hari. Para warga desa Lung Anai saling bertegur sapa dan bertemu ketika mereka hendak pergi ke ladang maupun pulang. Selain itu, pelabuhan tersebut berfungsi pula sebagai tempat transaksi ekonomi berlangsung. Para perempuan pada musim panen akan bekerjasama mengatur hasil panen mereka, dengan mengikat sayuran yang dipanen secara bersama-sama, lalu menunggu para tengkulak yang datang untuk dibawa ke pasar.

Pada sore hari itu para ibu yang baru saja datang dari ladang mereka berjumlah sekitar 5 orang, nampak bergembira dengan daun pakis hasil panen mereka. Mereka bercerita bahwa pakis-pakis tersebut ditanam di tanah-tanah ladang mereka yang jaraknya paling dekat sekitar 2 km dari desa mereka. Mereka mengumpulkan pakis-pakis muda, dipotong dan diikat, lalu siap untuk dijual.

Mereka menunggu tengkulak yang akan membeli pakis Rp.900/ikat. Hasil penjualan tersebut dibagi rata kepada kelompok ibu-ibu yang tadi mengikat daun pakis tersebut. Kedatangan tengkulak sekira jam 2 malam. Tengkulak akan menjual esok harinya di pasar kecamatan Loakulu.



Gambar 7. Para ibu warga desa Lung Anai sedang mengikat daun pakis hasil panen dari ladang untuk dijual di pasar
Sumber: Foto diambil tanggal 17 Juli 2013.

Fungsi dari pelabuhan itu tidak hanya untuk aktivitas ekonomi, namun juga aktivitas sosial-budaya. Hal ini terlihat dari setiap warga yang memanfaatkan pelabuhan tersebut untuk membersihkan mobil, motor, hingga memandikan anak-anak balita mereka. Sungai Jembayan merupakan anak sungai Mahakam bersama. Terdapat anak sungai-anak sungai Mahakam yang lain seperti sungai Payang, sungai Separi, dll. Keberadaan sungai-sungai itu merupakan jantung dari aktivitas warga Dayak Kenyah di Lung Anai.

Selain sebagai jalur transportasi, sungai Jembayan bagi warga Lung Anai merupakan sumber pangan yang penting. Untuk memenuhi kebutuhan protein yang dibutuhkan, warga biasa mencari ikan-ikan dari sungai Jembayan untuk dimasak: dibakar, digoreng maupun dipanggang. Warga yang melakukan pekerjaan tersebut laki-laki maupun perempuan.

Dalam struktur penguasaan tanah dan juga keahlian-keahlian dalam memnuhi pangan keluarga, warga Dayak Kenyah termasuk kedalam marga yang saling berbagi kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi ladang berpindah, diperlukan kerjasama yang baik dan butuh tenaga kerja yang baik pula sehingga

diskriminasi gender berdasarkan pekerjaan tidak ada. Hal ini dapat kita pahami dari kisah Mamak saat membuka ladang untuk menanam padi ladang yang hanya bisa satu kali masa tanam saja dalam satu tahun.

Mamak membuka ladang berpindah bersama dengan keluarga serta tetangga-tetangganya. Sayangnya, saat kami berada disana, ladang baru saja dipanen, sehingga kami tidak dapat melihat perayaan panen maupun saat tanam. Ladang sedang memasuki masa tunggu untuk masuk ke musim tanam kembali.

Tanah-tanah ladang ini terletak jauh dari tempat tinggal warga Lung Anai. Ladang-ladang mereka tidak masuk kedalam administrasi “desa wisata Lung Anai”. Keterancaman tanah-tanah mereka sangat besar, mengingat pola berladang berpindah yang biasanya mereka tandai dengan membangun sebuah pondok semi permanen sebagai bentuk simbol penguasaan tanah mereka. Biasanya, bila sudah ada pondok yang dibangun, maka warga yang lain harus mencari lagi tanah yang belum digarap/ diolah oleh keluarga tertentu.

Menurut mamak Pirin, hidupnya pada masa lalu sangat susah. Ia mulai terbuka melihat banyak orang yang diluar “kelompok”nya memiliki hal-hal yang “berbeda”. Ia merasa menjadi si-“lain” dari satu peradaban yang dianggapnya lebih baik dan lebih modern. Maka Mamak memutuskan mengubah dirinya sama dengan “orang hilir”. Maka, ia pun memutuskan memotong telinga panjangnya, meski kemudian ia menjadi orang yang kehilangan identitas sebagai orang dayak. Namun saat ini ia merasa sangat aneh melihat saat ini banyak sekali yang mencari orang yang masih memiliki telinga panjang. Mamak mengatakan orang yang memiliki telinga panjang sering diajak ke luar negeri, pergi ke luar kota, naik pesawat, berjalan-jalan dan juga difoto-foto. Maka, ia pun ketika memiliki seorang cucu menyarankan agar telinganya dipanjangkan. Namun, sang anak menolak karena ia merasa malu memanjangkan telinga sebab sudah tidak ada lagi anak-anak Dayak lain yang berbuat demikian.

“ ... dulu ketika kami tinggal di rumah panjang (lamin), kami dianggap tidak sehat, urang bersih.. dst. kami melihat bagus sekali ada orang-orang yang menggunakan baju tidak seperti kami yang memakai baju dari kulit kayu... Baju masih memakai lembar kayu, tidak ada yang memakai kain seperti ini (memegang baju), indah betul..” ucap mamak.

Mamak merupakan generasi awal penduduk Lung Anai. Pada saat ia masuk ke daerah Lung Anai ini, menurut ingatannya, sudah ada para penduduk lainnya. Mereka umumnya adalah para pekerja di usaha perkebunan. Hal ini nampaknya selaras dengan kondisi tahun 80-an, ketika usaha eksploitasi perkebunan menjadi komoditas penting yang menjadi andalan pemerintah pada masa itu. Hanya orang-orang Dayak saja yang menggarap ladang. Saat ini potensi sengketa tanah sangat tinggi ketika industri pertambangan batubara masuk. Banyak orang yang dahulunya tidak menggarap tanah melakukan klaim terhadap tanah-tanah yang digarap oleh warga Dayak saat ini. Mereka mengatakan bahwa selama ini warga Dayak hanya diberikan hak mengolah-nya saja, dan tidak memiliki hak milik. Dalam klaim tersebut pada akhirnya suku Dayaklah yang seringkali menang.

“Sekarang banyak orang yang mengaku tanah-tanah yang kita orang garap milik mereka..kalau sudah begitu ya sudah, kita orang menang saja..”⁴⁷

Siasat warga dayak atas pengelolaan dan penguasaan Tanah

Dalam pandangan Suku Dayak Kenyah, sebagaimana pandangan suku Dayak lain, pengolahan tanah memiliki waktu tersendiri seperti waktu menanam, waktu merawat, dan berpindah. Metode ini dikenal gilir balik (ladang berpindah) dengan siklus 6 M yaitu menebas, menebang, membakar, menugal merumput dan menuai. Sistem semacam ini dapat dilihat sebagai bentuk perladangan yang berkesinambungan.⁴⁸

Ladang yang sudah digunakan setelah satu-dua tahun akan dibiarkan oleh warga, dan mereka mulai mencari lahan baru. Tanah kemudian dibiarkan tumbuh ilalang, memberi istirahat tanah tidak ditanami lebih dahulu, sehingga mengalami penghumusan kembali. Upaya ini dilakukan sebagai cara untuk memberi unsur hara alami bagi tanah itu. Ketika setelah 3-5 tahun para peladang akan kembali lagi kepada tanah ladang tersebut karena dianggap sudah subur dan siap untuk ditanami kembali.⁴⁹

47 Wawancara dengan Mamak, 18 Juli 2013, di Lung Anai.

48 Marilyn, “Tanah (dan) Air yang (akan) Hilang di Balai Riam”, dalam Budi Susanto (eds), *Ge(mer)Lap Nasionalitas Postkolonial*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 134-135.

49 *Ibid.*

“ Iya, habis tanam, (kita) tunggu rumputnya tumbuh, kita bersihin lagi. Sudah bersih, baru kita menemui (mengolah—pen) lagi.”⁵⁰

Warga Lung Anai mengerjakan membuka ladang secara bersama-sama baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan karena dengan pola menanam ladang secara berpindah medannya sangat sulit diperlukan waktu yang lama, serta tenaga yang banyak. Biasanya para warga membuka ladang berkerjasama dengan beberapa keluarga yang lain. Mereka misalnya berangkat hari senin baru hari sabtu mereka tiba kembali di rumah. Praktis selama satu minggu mereka meninggalkan rumah.

Warga Lung Anai menyebut beras yang mereka tanam sebagai padi gunung atau padi mayas. Untuk menanam lahan seluas 250m, mereka hanya membutuhkan sekitar satu kaleng bibit, dan mendapatkan jumlah yang cukup besar saat panen tiba.

“Kalau kemarin (kami menanam sebanyak) dua. Dapat sekitar 30 kaleng. Kalau satu kaleng, yang baru, 7 kilo. Sekitaran, 210kg lah (dapatnya).”⁵¹

Pekerjaan itu dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Namun, saat industri batubara dan sawit masuk mengepung wilayah ini, Narni menceritakan bahwa aktivitas berladang-nya agak terkendala. Suaminya saat ini bekerja di perusahaan tambang, sehingga waktunya terbatas untuk berladang. Akibatnya ia pun menjadi tidak berladang sebagaimana para perempuan lain di desa-nya.

Alasan lainnya adalah, ia melihat agak susah mencari lahan untuk dijadikan ladang saat ini, dikarenakan sudah mulai adanya klaim-klaim atas tanah yang dari dahulu ia pahami sebenarnya lahan tersebut adalah garapan orang warga Kenyah, dan warga Dayak Kenyah bisa kapan pun menggarap lahan tersebut.

“Cari lahan agak susah sekarang. Sudah ada yang ngaku-ngaku sekarang tanah mereka, karena ada batubara masuk.... karena (mereka) pikir batu bara.. *ah duit.. nah..*”⁵²

Bagi Narni yang memiliki pendidikan relatif tinggi, saat ini sedang mengambil kuliah PGSD/TK, dibandingkan dengan para perempuan lain di desanya, ia mampu bersiasat atas keterbatasan penguasaan tanah-tanah

50 Wawancara dengan Narni (bukan nama sebenarnya), 19 Juli 2013, di Lung Anai.

51 *Ibid.*

52 *Ibid.*

komunalnya dengan memilih untuk bekerja dalam Forum Masyarakat desa, ataupun di PNPM, dan juga menjadi guru taman kanak-kanak, sebagai pengganti pekerjaannya. Namun, beberapa warga perempuan di Lung Anai yang menggarap tanah mereka, pekerjaan tersebut menjadi beban ganda dan menjadi lebih berat. Hal ini dikarenakan selain harus mengurus rumah para perempuan yang menggarap lahan harus mengerjakan sendiri ladang mereka. Para suami lebih memilih kerja di perusahaan dianggap lebih pasti mendapatkan uang.

Pandangan atas penting-nya tanah bagi warga Dayak Kenyah di Lung Anai masih menjadi pandangan umum warga, meski kemudian keterancaman mereka demikian nyata. Ketersingkirkan atas akses tanah mereka sangat halus dan tak terlihat contohnya seperti memilih lahan ladang mereka. Namun jika mereka lalai sedikit saja, dengan membiarkan klaim-klaim atas tanah ladang mereka, bukan tak mungkin proses ketersingkirkan gelombang kedua akan mereka temui kembali setelah ketersingkirkan nenek moyang mereka dari Apokayan. Ketersingkirkan ini diakibatkan oleh pertambangan batubara yang digembar-gemborkan oleh pemerintah sebagai komoditas andalan dalam skema percepatan pembangunan.

E. Penutup

Perubahan corak kekuasaan dari sentralistik menjadi desentralistik pada awal masa reformasi menjadi angin segar tersendiri bagi dunia politik. Situasi pasca rezim otoriter, dimanapun tempatnya, memicu perubahan dalam segala bidang, termasuk soal bagaimana konstelasi politik. Kasus di Indonesia, pasca rezim otoriter memunculkan perubahan di tingkat politik lokal yang cukup signifikan. Namun, para aktor politiknya masih merupakan aktor-aktor “lama”. Sebut saja, bupati baru Kutai Kertanegara sebagai wilayah kabupaten baru, tetap berasal dari Partai Golkar. Selain itu, faktor elite-elite lokal yang muncul sebagai penguasa sekaligus peran mereka menjadi pengusaha. Wilayah-wilayah kekuasaan tersebut dipimpin oleh tata pemerintahan yang oligarkis.

Dengan tata pemerintahan semacam itu, ketika arus besar kapital masuk ke arena sumber daya alam, maka yang terjadi adalah perlombaan akumulasi kapital baik di kalangan elite penguasa, apalagi oleh pengusaha, yang wujudnya melalui dikeluarkannya ijin konsesi-konsesi secara *gor-*

Moran termasuk konsesi pertambangan. Salah satu wilayah yang memiliki konsesi pertambangan yang terbanyak di Kalimantan Timur adalah di Kutai Kertanegara (Kukar).

Rezim yang terbentuk di Kutai Kertanegara merupakan potret dari rezim konsesi pertambangan. Ijin konsesi yang keluar bisa sangat mudah didapatkan, regulasi yang longgar, pengawasan yang lemah, membuat lingkaran “kesejahteraan” dalam industri tambang hanya dinikmati oleh “lingkaran kekuasaan” belaka dan bukan menyejahterakan masyarakat. Hal ini dibuktikan meski dengan banyaknya konsesi yang dikeluarkan, tentunya pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya meningkat dan memberi dampak pada kesejahteraan warga. Namun yang terjadi di Kukar justru berbanding terbalik. Ijin konsesi yang dikeluarkan jumlahnya berbanding terbalik dengan angka kemiskinan di Kukar. Angka kemiskinan di Kukar menempati posisi nomor satu di Kaltim.

Meluasnya konsesi pertambangan memicu pengalihfungsian lahan besar-besaran. Perebutan tanah di Kutai Kertanegara samapai saat ini sedengan berlangsung dengan sangat masif. Mode perampasan tanah mulai dari yang persuasif melalui skema jual-beli—penggantian harga tanah meski dengan harga yang murah; hingga sabotase, dengan merusak fasilitas umum, seperti membiarkan jalanan rusak, dan tambang juga mengakibatkan banjir dan lingkungan tidak sehat. Warga Kertabhuana sudah tidak lagi mampu menahan laju pertambahan luasan pertambangan yang telah “merebut” tanah-tanah mereka, karena segala bentuk mode perampasan lahan nyata di depan mata. Dengan kondisi jalanan di depan rumah mereka yang berdebu, suara bising truk-truk pengangkut selama 24 jam non-stop, membuat mereka tidak memiliki pilihan lain, selain harus “menyerah” dengan “menunggu” kepastian harga jual tanah yang akan menghampiri mereka. Ketersingkirkan akses atas tanah-nya menjadi sangat nyata, baik laiki-laki lebih-lebih perempuan.

Tidak hanya desa transmigran yang mengalami ketercerabutan atas lahan mereka, desa masyarakat suku Dayak Kenyah yang juga dijadikan desa budaya oleh Pemda, sebagai desa “penduduk asli” Kalimantan pun mereka mengalami keterancaman yang sama yang diakibatkan oleh industri tambang. Penyingkirkan yang mereka hadapi saat ini juga dari arah lain berupa klaim tanah ladang mereka oleh etnis lain. Dua desa yang berbeda karakter ini memiliki satu kesamaan yakni terancam oleh

pertambangan. Para perempuan penjaga pangan yang dimiliki oleh warga di dua desa ini sebagian besar masih berjuang melawan tambang, sebagian lagi mereka sudah menyerah. Proses penyingkiran agraria melalui tambang ini terjadi bukan oleh sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, namun justru dari para penguasa di negeri ini, yang seharusnya menjadi pelindung warga negara-nya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel, Buku

- Agustino, Leo, dan Mohammad Agus Yusoff. "Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik." *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, 2010.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Erman, Erwiza. "Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka," dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: YOI dan KITLV, 2007.
- Klinken, Van Gerry. "Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal," dalam Jamie. S Davidson, David Henley, Sandra Moniaga, ed. *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV, 2010.
- Komnas perempuan. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender: Mendengarkan Suara perempuan Korban Peristiwa 1965*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.
- Larasati, Rachmi Diyah. *The Dance That Makes You Vanish*. Minneapolis: Minnesota University Press, 2013.
- Maunati, Yekti. *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Merilyn. "Tanah (dan) Air yang (akan) Hilang di Balai Riam", dalam Budi Susanto (eds), *Ge(mer)Lap Nasionalitas Postkolonial*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Mustikaningrum, Laila. "Pemiskinan Perempuan dalam Industri Pertambangan Batubara (Studi Kasus Kota Samarinda-Kaltim),"

- makalah konferensi II tentang *Perempuan dan Pemiskinan*, Komnas Perempuan dan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1–4 Desember 2012.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: YOI dan KITLV, 2007.
- Razavi, S. “Introduction: Agrarian Change, Gender and Land Rights,” dalam *Journal of Agrarian Change* 3 (1-2), 2003.
- Rocheleau, Dianne, Barbara Thomas-Slayter, dan Esther Wangari. “Gender and Environment: A feminist Political ecology Perspective,” dalam Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, and Esther Wangari (eds.). *Feminist Political Ecology*. New York and London: Routledge, 1996.
- Semedi, Pujo. “Etnohistori dalam Penelitian Empiris Pedalaman: Kuliah Umum Pujo Semedi Hargo Yuwono” di Auditorium FIB UGM, 27 Juli 2012 dari: <http://etnohistori.org/database/audio-visual/etnohistori-dalam-penelitian-empiris-pedalaman-kuliah-umum-pujo-semedi-hargo-yuwono>, diakses tanggal 2 Oktober 2013
- Sidel, J. T. (1997). “Philippine Politics in Town, District, and Province: Bossism in Cavite and Cebu.” *The Journal of Asian Studies* 56(4).
- Simarmata, Rikardo. “Legal complexity in natural resources management in the frontier Mahakam Delta of East Kalimantan, Indonesia”, dalam *Journal of Legal Pluralism*, no. 62, 2010, hal 118-120.
- Siscawati, Mia, dan Avi Mahaningtyas. “Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan Tata Kelola Hutan di Indonesia”, dipresentasikan dalam seminar Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan Tata Kelola Hutan di Indonesia, Kamis, 18 Oktober 2012. Bogor
- Syaukani HR. *Menolak Kembalinya Sentralisasi, Memantapkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- Tohari, Amin, “Akumulasi Penguasaan Sumber Agraria sebagai Penghambat Pelembagaan Demokrasi Lokal (Mendiskusikan Kutai Kertanegara)”, *Jurnal Politika*, Vol.8, no.1, tahun 2012.
- Tsing, Anna, *Friction: An Ethnography of Global Connection*, Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2005.

Wicaksono, Arief dan Siti Maemunah (ed), *Membaranya batubara: Pengerukan Batubara dan generasi suram Kalimantan*, Jakarta: Jatam, 2010.

Winters, Jeffrey A, *Oligarki*. Jakarta: Gramedia, 2011.

Dokumen

Data daftar Sengketa Tanah BPN Provinsi Kaltim tahun 2011.

RPJMD Kutai Kertanegara tahun 2005-2010.

Website

“Izin Tambang Meledak Setelah Otonomi”. *Kaltimpost*, 14 Maret 2013.

Diakses dari: <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/14681/izin-tambang-meledak-setelah-otonomi.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 12.30 WIB.

DPRD Desak Kompensasi MPP Loa Kulu Masuk Pendapatan Desa. Diakses di <http://www.poskotakaltim.com/berita/read/10688DPRD%20Desak%20Kompensasi%20MPP%20Loa%20Kulu%20Masuk%20Pendapatan%20Desa>, diakses pada tanggal diakses pada 29 Oktober 2013 pukul 07.45 WIB.

FPMLK Terima 12 Mobil Sosial. <http://www.vivaborneo.com/1096.htm>, diakses pada tanggal diakses pada 29 Oktober 2013 pukul 07.30 WIB.

Hidayat, Firman, Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/28/058483967/Izin-Tambang-di-Kalimantan-Timur-Terus-Bertambah> pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 12.45 WIB.

Mahandis Yoanata. “Kenali Titisan Kerajaan Kutai ing Martadipura,” diakses di Sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara. <http://kesultanan.kutaikartanegara.com/index.php?menu=Sejarah> pada tanggal 31 Oktober 2013 pukul 16.35

Dari : <http://www.kabarenergi.com/berita-sepenggal-kisah-miliarder-batubara-kiki-barki.html>, diakses pada tanggal 26 November 2013; 3:15 pm.

PT. Mega Prima Persada Diminta Ditutup, dari: <http://www.poskotakaltim.com/berita/read/7822PT%20Mega%20Prima%20>

Persada%20Diminta%20Ditutup diakses pada 29 Oktober 2013 pukul 09.57WIB

Kristanto, Iganitius, Iganitius Kristanto. Mantan Kepala Daerah Berkuasa Kembali: Setahun Pilkada Golput meningkat, dari: http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6433&coid=3&caid=3&gid=2 diakses pada 31 Oktober 2013 pukul 17.45 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Mamak ,16-19 Juli 2013, di Lung Anai, Kukar.

Wawancara dengan Bapak Ketut 14 Juli 2013; jam 14.00-16.00 di Kertabhuana, Kukar.

Wawancara dengan Ibu Syamsyiah, 15 Juli 2013; Jam 14.00-16.00; di Kertabhuana, Kukar.

Wawancara dengan Bernard, salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) *Good Governance* Kaltim, pada tanggal 13 Juli 2013; pukul 21.00-23.45 di Samarinda, Kaltim.

Wawancara dengan Ibu Semani, 14-15 Juli 2013 di Kertabhuana, Kukar.

Wawancara dengan Pdt. Ungau Njau, 18 Juli 2013;jam 16.30-18.30, di Lung Anai, Kukar.

Wawancara dengan Narni; 17-19 Juli 2013, di Lung Anai, Kukar.

Wawancara Tim dengan Kahar Al Bahri (Jatam Kaltim), 12 Juli 2013; jam 13.30-15.00 di Samarinda, Kaltim.

Wawancara tim peneliti dengan Haris Retno Budi, 14 Juli di Tenggarong, Kaltim; jam 19.00-22.00.